

IMPLEMENTASI KOMITE SEKOLAH DI SMP NEGERI 10 PALEMBANG



SKRIPSI SARJANA S.1

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.)**

**Oleh
TRISNAWATI
NIM. 13290107**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
2018**

Hal : Pengantar Skripsi

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Raden Fatah Palembang
di
Palembang

Assalammu'alaikum, Wr. Wb

Setelah kami periksa dan diadakan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI KOMITE SEKOLAH DI SMP NEGERI 10 PALEMBANG"** ditulis oleh saudara **"TRISNAWATI, NIM 13290107"**, telah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang.

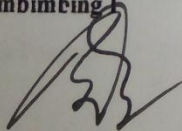
Demikianlah atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb

Palembang,

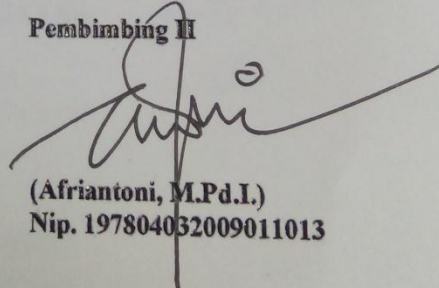
2018

Pembimbing I



(Dr. H. KMS. Badaruddin, M.Ag.)
Nip.196292141990031002

Pembimbing II



(Afriantoni, M.Pd.I.)
Nip. 197804032009011013

Skripsi Berjudul

IMPLEMENTASI KOMITE SEKOLAH DI SMP NEGERI 10 PALEMBANG

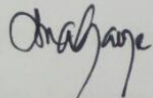
yang ditulis oleh Trisnawati, NIM. 13 29 01 07
telah dimunaqsyahkan dan dipertahankan
di depan Panitia Penguji Skripsi
pada tanggal 31 Juli 2018

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Pendidikan (S.Pd.)

Palembang, 31 Juli 2018
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

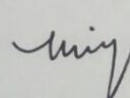
Panitia Penguji Skripsi

Ketua



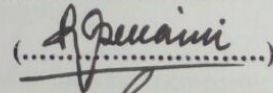
M. Hasbi, M.Ag.
NIP. 19760131 200501 1 002

Sekretaris

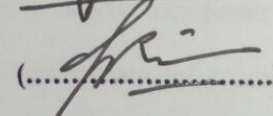


Kris Setyaningsih, S.E., M.Pd.I.
NIP. 19640902 199003 2 002

Penguji Utama : Dra. Hj. Rusmaini, M.Pd.I.
NIP. 19570320 198503 2 002

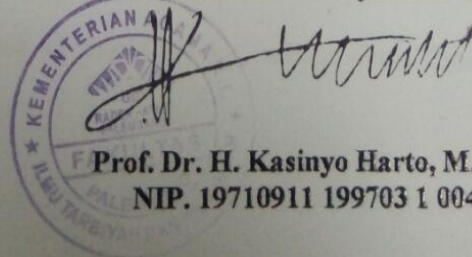

(.....)

Anggota Penguji : Dr. Febriyanti, M.Pd.I.
NIP. 19770203 200701 2 015


(.....)

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan


Prof. Dr. H. Kasinyo Harto, M.Ag.
NIP. 19710911 199703 1 004

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah SWT yang maha mempunyai segala-galanya seluruh alam semesta ini. Yang telah menganugerahkan nikmat, melimpahkan rahmat, dan memberikan *ma'rifat*. Hanya kepada-Nyalah kita menghambakan diri atas segala ta'at, dan hanya kepada-Nyalah kita menyandarkan diri atas segala hajat. Semoga kita selalu mendapat bimbingan dari Allah Yang Maha Kuasa.

Shalawat beriring salam tidak henti-hentinya tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar kita Muhammad SAW, serta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya hingga hari kiamat. Semoga kita termasuk orang-orang yng mendapat syafa'at, kelak di hari kiamat yang pasti datang.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka mengakhiri Studi Sarjana (S.1) Prodi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. Adapun judul skripsi ini adalah “Implementasi Komite Sekolah di SMP Negeri 10 Palembang”.

Dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini, penulis banyak memperoleh bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis banyak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Kasinyo Harto, M.Ag., Selaku dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang.
2. Yth. Bapak M. Hasbi, M.Ag., selaku Ketua Prodi Manajemen Pendidikan Islam.

3. Yth. Bapak Dr. H. KMS. Badaruddin, M.Ag., selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Yth. Bapak Afriantoni, M.Pd.I., selaku Pembimbing II yang juga telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing penulisan dengan penuh kesabaran dan ketelitian, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Yth. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang yang sejak semester awal sampai akhir dengan hati ikhlas telah membimbing dan memberikan pengetahuan serta mengarahkan penulis sehingga dapat memperoleh gelar Sarjana.
6. Yth. Ayahanda dan Ibunda tercinta dalam kesabarannya mendidik dan membimbing anaknya. Serta dalam memberikan segalanya, lewat do'a dan kerja keras serta harapan yang setiap langkah dan waktu selalu mengiringi anakmu ini.
7. Saudara-saudaraku tersayang yang selalu memberikan semangat, motivasi, kesabaran dalam menghadapi kakakmu. Semoga Allah SWT menjadikan kita anak-anak yang menjadi jalan menuju surga untuk orang tua kita.
8. Teman mahasiswa angkatan 2013 Prodi Manajemen Pendidikan Islam 1 sampai 3 yang senantiasa memberikan saran dan dorongan dalam penulisan skripsi ini.
9. Kepala sekolah beserta staf dewan guru SMP Negeri 10 Palembang.

10. Kepada semua pihak tanpa terkecuali yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis mendo'akan semoga Allah SWT membalas amal kebaikan kita semua, tak ada ganjaran yang layak untuk suatu amalan yang ikhlas melainkan syurga-Nya. Semoga kita semua menjadi orang yang sukses dalam segala hal.

Palembang, 2018

Penulis

Trisnawati

Nim.13290107

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PENGANTAR PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR BAGAN	ix
ABSTRAK	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Definisi Konseptual.....	8
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metodologi Penelitian	17
H. Sistematika Pembahasan	23

BAB II LANDASAN TEORI

A. Komite Sekolah	
1. Pengertian Komite Sekolah.....	26
2. Tujuan Komite Sekolah	28
3. Peran Komite Sekolah	31
4. Fungsi Komite Sekolah	32
5. Keanggotaan dan Kepengurusan Komite Sekolah	33

6. Mekanisme Pembentukan Komite Sekolah	35
B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Komite Sekolah	37

BAB III DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah Sekolah	38
B. Profil Sekolah	39
C. Visi dan Misi	40
D. Tugas Pokok dan Fungsi Karyawan	42
E. Struktur Organisasi	50
F. Keadaan Guru	53
G. Keadaan Siswa dan Guru	58

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Komite Sekolah di SMP Negeri 10 Palembang.....	61
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Komite Sekolah di SMP Negeri 10 Palembang	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	86
B. Saran-Saran	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 3.1. Daftar Nama Guru dan Pegawai.....	52
Tabel 3.2. Data Siswa	57
Tabel 3.3. Data Guru dan Pegawai.....	58
Tabel 3.4. Keadaan Sarana dan Prasarana.....	59

DAFTAR BAGAN

Bagan	Halaman
Tabel 3.1. Struktur Organisasi Lembaga Pendidikan SMP Negeri 10 Palembang .	50
Tabel 3.2. Struktur Organisasi Komite SMP Negeri 10 Palembang	51

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “*Implementasi Komite Sekolah di SMP Negeri 10 Palembang*”. Komite sekolah merupakan suatu badan atau lembaga non profit dan non politis, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para *stakeholder* pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan.

Sesuai dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah maka pembahasan ini bertujuan untuk untuk mengetahui bagaimana implementasi komite sekolah yang ada di SMP Negeri 10 Palembang. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam implementasi komite sekolah di SMP Negeri 10 Palembang.

Dalam Implementasi Komite sekolah di SMP Negeri 10 Palembang, dilaksanakan dengan mengoptimalkan empat peran komite sekolah, yakni komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*), komite sekolah sebagai pendukung (*supporting agency*), komite sekolah sebagai pengontrol (*controlling agency*), dan komite sekolah sebagai mediator (*mediator agency*).

Dalam penelitian penulis menggunakan penelitian kualitatif. Informan dalam penelitian ini yaitu ketua komite sekolah sebagai key informan sedangkan guru dan kepala sekolah sebagai informan pendukung. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara ditunjukkan kepada ketua komite sekolah, guru dan kepala sekolah. Dokumentasi digunakan untuk menghimpun data tentang implementasi komite sekolah. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi data.

Berdasarkan analisis penulis bahwa, implementasi komite sekolah di SMP Negeri 10 Palembang dalam pelaksanaannya sudah tergolong baik. Hal ini dapat dibuktikan dalam pelaksanaan empat peran komite sekolah sudah berjalan sesuai yang diinginkan. Dengan memberikan masukan dalam penusunan RAPBS, memberikan dukungan berupa masalah pembiayaan, komite sekolah sebagai pengontrol, dan komite sebagai mediator atau jembatan antara orang tua murid dan pihak sekolah. Faktor penghambat dalam hal partisipasi orang tua murid masih kurang, sulitnya dalam mengumpulkan orang tua murid dikarenakan kesibukan masing-masing orang tua. Faktor yang mendukung dalam implementasi komite sekolah meliputi: penguatan kelembagaan komite sekolah, kemampuan organisasional komite sekolah, menjalin kerja sama dengan institusi terkait, dan partisipasi orang tua murid.

Kata Kunci : Komite Sekolah, Implementasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menyadari pentingnya proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka pemerintah telah berupaya mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum dari sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pembangunan dan sarana ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga pendidikan lainnya. Tetapi kenyataannya belum cukup dalam meningkatkan kualitas pendidikan. salah satu bentuk aktualiasinya dibentuklah suatu badan pembantu sekolah, organisasi orang tua murid atau wali. Sampai sekarang, organisasi ini telah beberapa kali mengalami perubahan nama karena disesuaikan dengan perkembangan situasi pendidikan dan masyarakat pada mulanya organisasi ini bernama Perkembangan Orang tua Murid dan Guru (POMG), kemudian berubah menjadi Persatuan Orang tua Murid (POM), Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3), dan sekarang dikenal dengan istilah Komite Sekolah.¹

Maksud dibentuknya Komite Sekolah adalah agar ada suatu organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalita serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. Komite Sekolah yang dibentuk dapat dikembangkan

¹ Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada) hlm. 93

secara khas dan berakar dari budaya, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai dengan potensi masyarakat setempat.

Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.² Sebagaimana diketahui bahwa peningkatan mutu pendidikan sangat bergantung pada pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan, sementara rendahnya alokasi dana pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap pendidikan akan berdampak pada ketertinggalan atau keterbelakangan pendidikan tersebut dari pendidikan pada Negara berkembang lainnya.³

Komite sekolah terdapat didalam lingkungan sekolah yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan hirarkis dengan satuan pendidikan sekolah maupun lembaga-lembaga pemerintah lainnya dianggap sebagai solusi dan harapan bagi seluruh praktisi pendidikan dalam mengatasi masalah pembiayaan pendidikan di Negara Indonesia, karena komite sekolah adalah badan yang demokratis, akuntabel dan tidak terikat oleh apapun (individu maupun kelompok), dan merupakan suatu organisasi yang menjalin kerja sama ketiga unsur pendidikan atau *Tri Pusat Pendidikan*, sehingga organisasi ini dapat bergerak bebas dan saling bahu-membahunya ketiga unsur pendidikan tersebut dalam upaya peningkatan mutu

²Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Yogyakarta:Media Abadi, 2005), hlm 10

³Kompri, *Manajemen Sekolah: Teori dan Praktik*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 361

pendidikan dengan cara membantu pembiayaan pendidikan pada salah satu lembaga atau satuan lembaga pendidikan.⁴

Pasal 56 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tentang Komite Sekolah menjelaskan bahwa (1) masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah. (2) dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hierarki (mengikat). (3) komite sekolah sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkatan satuan pendidikan. (4) ketentuan mengenai pembentukan komite sekolah sebagaimana dibentuk dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.⁵

Pendidikan saat ini mempunyai peranan penting dalam mencerdaskan bangsa khususnya pendidikan dasar dan menengah berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional misalnya dengan pengembangan kurikulum, peningkatan mutu guru, perbaikan sarana pendidikan, pengadaan buku dan alat peraga, serta meningkatkan mutu manajemen sekolah. Namun demikian, berbagai

⁴*Ibid*, hlm. 361

⁵*Ibid*, hlm. 362

indikator mutu pendidikan belum menunjukkan mutu yang berarti. Sebagian sekolah memang telah menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang cukup menggembirakan, namun pada umumnya, sebagian besar lainnya masih memprihatinkan. Dikarenakan sistem birokrasi selalu menempatkan kekuasaan sebagai faktor yang paling menentukan dalam proses pengambilan keputusan.

MBS merupakan salah satu model manajemen pendidikan yang berbasis pada otonomi atau kemandirian sekolah dan aparat daerah dalam menentukan arah, kebijakan, serta jalannya pendidikan di daerah masing-masing. Keberhasilan dalam MBS sangat ditentukan oleh perwujudan kemandirian manajemen pada tingkat kabupaten atau kota. Dalam UU No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) khususnya Bab VII (Pembangunan Pendidikan) digambarkan bahwa dunia pendidikan di Indonesia menghadapi tantangan besar, diantaranya adalah diberlakukannya otonomi daerah, sistem pendidikan nasional dituntut melakukan perubahan dan penyesuaian sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keberagaman kebutuhan/keadaan daerah dan peserta didik, serta mendorong partisipasi masyarakat.⁶

Komite sekolah harus ikut terlibat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan di sekolah. Komite sekolah juga sebagai lembaga mandiri yang dibentuk untuk berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Acuan Operasional dan Indikator Kinerja Komite Sekolah*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan dan Menengah, 2004), hlm. 7

yang salah satunya ikut membantu penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pembelajaran disekolah.

Seharusnya komite sekolah mengetahui tugas dan fungsinya. Komite sekolah memiliki untuk mengontrol pelaksanaan manajemen sekolah. Komite sekolah pada saat ini telah menjadi perangkat sekolah yang dapat memberikan masukan apa saja, apalagi berkaitan dengan konsep manajemen pendidikan berbasis sekolah yang pada dasarnya akan meningkatkan efektivitas manajemen sekolah.

Komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan perlu adanya dukungan dari beberapa pihak baik dari kepala sekolah, guru, siswa maupun masyarakat dan institusi pendidikan. Oleh karena itu kerja sama dan koordinasi yang baik antara komponen pendidikan tersebut, maka upaya komite sekolah dalam meningkatkan proses pendidikan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil observasi awal penulis menunjukkan bahwa SMP Negeri 10 Palembang merupakan lembaga pendidikan yang berinisiatif untuk membantu pemerintah dengan menyelenggarakan sistem pendidikan terpadu sebagai bentuk kepedulian dan kontribusinya terhadap bangsa. Inisiatif tersebut diwujudkan dengan menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dengan memberdayakan partisipasi masyarakat, sehingga SDM yang dihasilkan dapat berdaya guna secara maksimal.

Implementasi Komite Sekolah sudah berjalan cukup lama namun masih belum memberikan pengaruh yang signifikan. Hal ini disebabkan karena dalam implementasi Komite Sekolah terdapat kendala ataupun hambatan-hambatan.

Dengan melihat keadaan dan kondisi yang terjadi di SMP 10 Palembang tersebut dalam implementasi Komite Sekolah terdapat beberapa hambatan yang meliputi:

1. Masih kurangnya kerja sama sekolah dengan masyarakat, baik secara finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan.
2. Kurangnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan.
3. Sekolah masih kurang dalam melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan atau organisasi) dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.
4. Pengguna sumber daya tidak optimal, rendahnya anggaran pendidikan merupakan kendala yang besar.

Dengan adanya permasalahan tersebut penulis tertarik meneliti tentang “Implementasi Komite Sekolah di SMP Negeri 10 Palembang”. Dengan alasan memberi jawaban dan kontribusi positif terhadap SMP Negeri 10 Palembang mengenai pelaksanaan komite sekolah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi komite sekolah di SMP Negeri 10 Palembang?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi komite sekolah di SMP Negeri 10 Palembang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui implementasi komite sekolah di SMP Negeri 10 Palembang.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi komite sekolah pendidikan di SMP Negeri 10 Palembang.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Dalam penelitian ini dapat memberikan informasi umum tentang implementasi komite sekolah di SMP Negeri 10 Palembang dan menyampaikan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi komite sekolah di SMP Negeri 10 Palembang sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan kajian bagi penelitian selanjutnya.

b. Secara Praktis

Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini akan menambah wawasan dan pengetahuan baik bagi peneliti, maupun pihak sekolah. Serta memberikan pemahaman tentang implementasi komite sekolah.

D. Definisi Konseptual

Dalam penelitian ini istilah pokok yang perlu diberi definisi konseptual sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi berasal dari Bahasa Inggris “*implementasi*” yang artinya adalah pelaksanaan.⁷ Implementasi dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan atau penerapan. Oleh karena itu, implementasi dapat dipahami sebagai perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk pencapaiannya serta memerlukan jaringan dan pelaksanaan dan birokratis yang efektif.

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau

⁷ Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: Rosdakarya, 2006), hlm. 50

adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁸

Jadi implementasi adalah suatu penerapan atau pelaksanaan dari aktivitas atau kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan dan dari penerapan atau pelaksanaan tersebut dapat memberikan dampak atau efek.

2. Komite Sekolah

Komite sekolah merupakan salah satu bentuk organisasi yang merangkul dan mewadahi serta berusaha menyatukan visi dan misi komponen-komponen pendidikan yang terdapat dalam masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan pada satuan pendidikan yang berkaitan dengan masyarakat tersebut khususnya dan juga merupakan pemandirian satuan lembaga pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan masing-masing khususnya masalah pembiayaan pendidikan, tanpa harus ketergantungan pada pembiayaan yang disediakan oleh pemerintah pusat melalui APBN-nya dan pemerintah daerah melalui APBD-nya yang tidak akan pernah mencukupi kebutuhan-kebutuhan pada satuan lembaga pendidikan dalam upaya menjadi lembaga suatu pendidikan yang bermutu dan berkualitas, dengan adanya komite sekolah diharapkan suatu lembaga atau satuan pendidikan tersebut dapat mandiri dan bermutu pada akhirnya.⁹

⁸ Fitri Oviyanti, dkk. *Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran*, (Palembang: Noer Fikri Offset, 2015), hlm. 53

⁹ Kompri, *Manajemen Sekolah: Teori dan Praktik*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 360

Jadi komite sekolah adalah suatu organisasi yang bersifat mandiri dan tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan sekolah maupun lembaga pendidikan lainnya. Komite sekolah memiliki kemandirian masing-masing, akan tetapi tetap sebagai mitra yang saling bekerja sama.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan hasil tinjauan pustaka yang dilakukan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang sedang direncanakan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan skripsi yang akan dilakukan oleh peneliti, diantaranya sebagai berikut.

Restu Handayani pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang (2011), dengan skripsinya yang berjudul *“Peran Komite Madrasah dalam Pengembangan Madrasah di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Model Palembang”*.¹⁰ Pada skripsi ini menjelaskan tentang seberapa besar keberadaan dan kinerja Komite Madrasah berperan dalam menunjang proses belajar mengajar, meningkatkan mutu pendidikan serta pengembangan Madrasah di Mts N 2 Model Palembang.

Iis Dahlia pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang (2015), dengan skripsinya yang berjudul *“Peran Komite Madrasah dalam Rencana Kerja Madrasah di Madrasah Ibtidaiyah Az-Zahir Palembang”*.¹¹ Pada

¹⁰Restu Handayani, *Peran Komite Madrasah dalam Pengembangan Madrasah di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Model Palembang*, (Palembang: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 2011), hlm. X, t.d.

¹¹Iis Dahlia, *Peran Komite Madrasah dalam Rencana Kerja Madrasah di Madrasah Ibtidaiyah Az-Zahir Palembang*, (Palembang: Fakultas Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang , 2015), hlm X, t.d.

skripsi ini menjelaskan tentang komite sekolah dalam rencana kerja sekolah dan lebih berfokus ke rencana kerja di Madrasah Ibtidaiyah Az-Zahir Palembang.

Sulaiman pada Fakultas Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang (2011) dengan skripsinya yang berjudul "*Kinerja Komite Sekolah pada SDN 1 Kota Agung Kabupaten Lahat*".¹² Menjelaskan bahwa tujuan penelitian untuk mengetahui apakah komite sekolah SDN 1 kota Agung kabupaten Lahat memiliki program kerja yang relevan dengan peningkatan mutu akademis siswa, selain itu tujuan penelitian ini untuk mengetahui kinerja komite sekolah SDN 1 kota Agung Lahat dalam mengaplikasikan program kerja komite tersebut.

Dari ketiga penelitian diatas dapat di simpulkan bahwa belum ada yang membahas tentang implementasi komite sekolah di SMP Negeri 10 Palembang. Karena berdasarkan penelitian diatas, penelitian Restu Handayani lebih memfokuskan seberapa besar keberadaan dan kinerja Komite Madrasah berperan dalam menunjang proses belajar mengajar, meningkatkan mutu pendidikan serta pengembangan Madrasah di Mts N 2 Model Palembang dan penelitian Iis Dahlia lebih fokus pada komite sekolah dalam rencana kerja sekolah dan lebih berfokus ke rencana kerja di Madrasah Ibtidaiyah Az-Zahir Palembang. Sedangkan penelitian Sulaiman lebih fokus pada komite sekolah dalam program kerja yang relevasn dengan peningkatan mutu akademis siswa, selain itu tujuan penelitian ini untuk mengetahui kinerja komite

¹² Sulaiman, *Kinerja Komite Sekolah pada SDN 1 Kota Agung Kabupaten Lahat*, (Palembang:Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang , 2011), hlm. X, t,d

sekolah SDN 1 kota Agung Lahat dalam mengaplikasikan program kerja komite tersebut

Sedangkan peneliti dalam penelitian kali ini fokus kepada *Implementasi Komite Sekolah di SMP Negeri 10 Palembang*.

F. Kerangka Teori

1. Pengertian Komite Sekolah

Pasal 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Berdasarkan pasal diatas maka komite sekolah terdiri dari sejumlah komunitas masyarakat yang perhatian terhadap kemajuan pendidikan.¹³

Komite sekolah terdapat di lingkungan sekolah yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan hirarkis dengan satuan pendidikan sekolah maupun lembaga-lembaga pemerintah lainnya dianggap sebagai solusi dan harapan bagi seluruh praktisi pendidikan dalam mengatasi masalah pembiayaan pendidikan di Negara Indonesia, karena komite sekolah adalah badan yang demokratis, akuntabel, dan tidak terikat oleh apapun (individu maupun kelompok), dan merupakan suatu organisasi yang menjalin kerja sama ketiga unsur pendidikan atau Tri Pusat Pendidikan, sehingga organisasi ini dapat bergerak bebas dan saling bahu-membahunya tiga unsur pendidikan tersebut dalam upaya meningkatkan mutu

¹³ Kompri, *Op.Cit*, hlm. 360

pendidikan dengan cara membantu pembiayaan pendidikan pada salah satu lembaga atau satuan satuan lembaga pendidikan.¹⁴ Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua wali murid, peserta didik, komunitas sekolah dan tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.¹⁵ Untuk mempermudah interaksi antara sekolah dengan masyarakat, konsep masyarakat akhirnya disederhanakan dalam bentuk perwakilan dalam jalan komite sekolah.

Fuat Ihsan mengatakan tanggung jawab masyarakat terhadap pendidikan sebenarnya masih belum jelas, tidak sejelas tanggung jawab pendidikan lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Hal ini disebabkan oleh faktor hubungan sifat dan pergaulan yang terjadi di dalam masyarakat. Meskipun demikian masyarakat mempunyai peran yang besar dalam pelaksanaan pendidikan nasional.¹⁶

Jadi komite sekolah adalah suatu lembaga yang mandiri yang beranggotakan orang tua wali, komunitas sekolah dan tokoh masyarakat yang peduli terhadap pendidikan yang ikut serta dalam kelancaran jalannya pengajaran di sekolah tersebut.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 361

¹⁵ Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, (Bandung: Fokus Media, 2003), hlm 22

¹⁶ Fuad Ihsan, *Dasar-Dasar Pendidikan*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1997), hlm.57

2. Peran dan Fungsi Komite Sekolah

Menurut Saiful Sagala dalam bukunya yang berjudul Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan peran komite sekolah ada empat antara lain yaitu (1) komite sebagai penasehat/pemberi pertimbangan (2) komite sebagai pendukung (3) komite sebagai pengontrol (4) komite sebagai mediator.

- a. Komite sebagai pertimbangan adalah menunjukan respond dan keikutsertaan Dewan Pendidikan dan komite sekolah memajukan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di daerah dan di sekolah. Bentuk aktivitas komite sekolah antara lain (a) memberi pertimbangan mengenai program yang disusun dalam rencana pembangunan pendidikan. (b) memberikan pertimbangan buat guru dalam pelaksanaan supaya tidak sewenang-wenangnya dalam menangani siswa misalnya dalam memberikan hukuman tetapi juga memberikan penghargaan bagi yang berprestasi. (c) memberikan pertimbangan dalam meningkatkan kedisiplinan guru dalam memberi solusi bagi kesulitan-kesulitan yang dihadapi guru. (d) memberikan pertimbangan dalam meningkatkan bakat dan minat siswa.
- b. Komite sebagai pendukung yaitu yang berkaitan internal manajemen sekolah (a) mendata jumlah guru yang memerlukan pendidikan dan latihan (b) memberikan pelatihan mengenai mata pelajaran dan layanan belajar bagi guru yang membutuhkan.

- c. Komite sekolah sebagai pengontrol yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di sekolah.
- d. Komite sekolah sebagai mediator yaitu melakukan kerja sama baik antara keluarga, sekolah dan masyarakat. Seperti memberikan laporan kepada masyarakat tentang penggunaan keuangan¹⁷

Adapun fungsi komite sekolah dalam rangka memberdayakan masyarakat dan lingkungan sekolah antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Memberikan pertimbangan (*advisory agency*) dalam memberdayakan masyarakat dan lingkungan sekolah serta menentukan dan melaksanakan kebijakan pendidikan.
- b. Mendukung (*supporting agency*) kerja sama sekolah dengan masyarakat, baik secara finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan.
- c. Pengontrol (*controlling agency*) kerja sama sekolah dengan masyarakat dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan *output* pendidikan.
- d. Mediator antara sekolah, pemerintah (eksekutif), dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD/legislatif), dengan masyarakat.
- e. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

¹⁷Saiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 256-260

- f. Melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan atau organisasi), dan dunia kerja, pemerintah, dan DPRD dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.
- g. Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah dsan DPRD, berkaitan dengan kebijakan dan program pendidikan.¹⁸

3. Tujuan Komite Sekolah

Tujuan dibentuknya komite sekolah sebagai suatu organisasi masyarakat sekolah adalah:

- a. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan disatuan pendidikan.
- b. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- c. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyeenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.¹⁹

¹⁸ Kompri, *Manajemen Sekolah: Teori dan Praktik*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 368

¹⁹Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, *Pemberdayaan Komite Sekolah*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2006), hlm. 4

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). Penelitian lapangan merupakan penelitian kualitatif dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat. Dalam penelitian lapangan, peneliti secara individu berbicara dan mengamati secara langsung orang-orang yang sedang ditelitinya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif artinya pendekatan yang dilakukan dengan menjelaskan, menerangkan, dan menguraikan pokok permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian ini kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif.²⁰

3. Desain Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan desain penelitian studi kasus merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif dimana penelitian melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktifitas, terhadap satu atau lebih orang. Suatu kasus terikat oleh waktu dan aktifitas, peneliti melakukan pengumpulan data secara mendetail dengan menggunakan

²⁰Saipul Annur, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Palembang: Grafika Telindo Press, 2008), hlm.29

beberapa prosedur pengumpulan data dan dalam waktu yang berkesinambungan.²¹

4. Data dan Informan Penelitian

a. Data

Data adalah semua fakta yang dapat diamati seperti catatan interview, skor, hasil-hasil tes, dan rekaman yang darinya dapat ditarik kesimpulan pengertian-pengertian yang bersifat umum. Dengan data kita dapat mudah dalam melakukan penelitian ini. Ada beberapa data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian ini yang dilihat dari rumusan masalah, seperti berikut ini :²²

- 1) Komite sekolah
- 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi komite sekolah di SMP Negeri 10 Palembang.

b. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan pihak-pihak yang dianggap mampu untuk memberikan informasi mengenai keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti sehingga data yang dihasilkan dapat akurat.²³ Peneliti menetapkan pihak-pihak yang menjadi sumber penelitian yaitu :

²¹Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung : Alfabeta, 2013), hlm.39-40

²²*Ibid.*, hlm 123

²³Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm.300

1) Key Informan (informan kunci) adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari tangan pertama, yaitu ketua komite sekolah. Informasi yang akan didapatkan dari ketua komite sekolah adalah mengenai implementasi komite sekolah dan faktor yang mempengaruhi implementasi komite sekolah.

2) Informan non kunci (tambahan) adalah informasi yang langsung diperoleh dari tangan kedua, yaitu :

a) Guru

Informasi yang akan didapatkan dari komite guru adalah mengenai implementasi komite sekolah.

b) Kepala Sekolah. Informasi yang akan didapatkan dari Kepala Sekolah adalah mengenai implementasi komite sekolah dan faktor yang mempengaruhi implementasi komite sekolah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan yang paling utama dari penelitian adalah mendapatkan data.²⁴

Adapun untuk teknik mengumpulkan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.375

a. Teknik observasi

Teknik observasi yaitu untuk mengamati secara langsung serta mencatat secara sistematis tentang fenomena-fenomena yang terjadi di lokasi penelitian mengenai implementasi komite sekolah dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi komite sekolah di SMP Negeri 10 Palembang.

b. Teknik wawancara

Teknik wawancara yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan guna memperoleh data yang lebih mendalam dan untuk mengkomparasikan data yang diperoleh melalui observasi. Peneliti menggunakan teknik ini untuk mengetahui sampai sejauh mana implementasi komite sekolah yang ada di sekolah SMP Negeri 10 Palembang serta faktor yang mempengaruhi kegiatan tersebut. Proses wawancara yang dilakukan peneliti yaitu menggunakan proses wawancara terbuka. Yang menjadi informan wawancara adalah kepala sekolah, komite sekolah, dan guru.

c. Teknik dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yang objektif mengenai sejarah singkat berdirinya sekolah, visi, misi, dan tujuan, keadaan komite sekolah, keadaan pegawai, keadaan siswa, struktur organisasi sekolah. Dokumentasi yang diambil berupa kegiatan yang telah dilakukan komite sekolah dan data yang menunjang lainnya.

6. Teknik Analisis Data

Dalam rangka menjawab perumusan masalah yang ditetapkan penulis maka analisis data yang menjadi acuan dalam penelitian ini mengacu pada beberapa tahapan yang di jelaskan Miles and Huberman, yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu:²⁵

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokus pada hal-hal yang penting dari hasil penelitian implementasi komite sekolah, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

b. Penyajian Data

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya

²⁵*Ibid.*, hlm.405-412

berdasarkan apa yang telah dipahami. Jadi data yang dirangkum tadi kemudian dipilih untuk disajikan dalam kalimat yang mudah dipahami.

c. Verifikasi

Verifikasi data dimaksudkan untuk penentuan data akhir dari keseluruhan proses tahapan analisis sehingga keseluruhan permasalahan dapat terungkap dan dituangkan dalam kalimat yang mudah dimengerti.

d. Triangulasi Data

Triangulasi data adalah pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu lagi.

Triangulasi merupakan suatu cara memandang permasalahan/objek yang akan dievaluasi dari berbagai sudut pandang, tujuannya agar dapat melihat objek yang akan dievaluasi dari berbagai sisi, triangulasi dilakukan untuk mengejar atau mengetahui kualitas data yang akan dipertanggung jawabkan.²⁶

²⁶ Suharsimi Arikunto dkk, *Evaluasi Program Pendidikan*,(Jakarta : Bumi Aksara,2007),.
Hlm. 136

H. Sistematika Pembahasan

Agar mudah dipahami dan dianalisa oleh pihak-pihak yang berkepentingan, maka penulis akan menguraikan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini akan diberikan penjelasan tentang latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, definisi konseptual, kerangka teori, metodologi penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori

Pada bab ini akan penulis uraikan tentang teori atau konsep yang meliputi teori-teori implementasi komite sekolah yang berisi tentang pengertian komite sekolah, tujuan komite sekolah, peran dan fungsi komite sekolah.

BAB III Tinjauan Umum Objek Penelitian

Pada bab ini penulis akan berikan gambaran umum lokasi penelitian mengenai sejarah, visi dan misi, struktur sekolah, struktur komite sekolah, keadaan guru dan tenaga lainnya, keadaan siswa, keadaan sarana dan prasarana SMP Negeri 10 Palembang.

BAB IV Pembahasan

Pada bab ini penulis akan mendeskripsikan data dan hasil penelitian yang meliputi implementasi komite sekolah di SMP Negeri 10

Palembang dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi komite sekolah di SMP Negeri 10 Palembang.

BAB V Penutup

Pada bab ini penulis akan mengambil suatu kesimpulan dan memberikan saran-saran yang dianggap perlu untuk dilaksanakan demi kemajuan SMP Negeri 10 Palembang.

Bagian akhir meliputi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Komite Sekolah

1. Pengertian Komite Sekolah

Pasal 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/ wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Berdasarkan pasal di atas maka komite sekolah terdiri dari sejumlah komunitas masyarakat yang sangat perhatian terhadap kemajuan pendidikan. Adanya komite sekolah dapat membantu kelancaran jalannya pengejaran di sekolah itu.²⁷ Sedangkan dalam UU RI No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pasal 54 ayat 3 dinyatakan bahwa: Komite sekolah adalah lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Komite sekolah merupakan salah satu bentuk organisasi yang merangkul dan mewadahi serta berusaha menyatukan visi dan misi komponen-komponen pendidikan yang terdapat dalam masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan pada satuan pendidikan yang berkaitan dengan masyarakat tersebut khususnya dan juga merupakan pemandirian satuan lembaga pendidikan dalam meningkatkan mutu

²⁷ Kompri, *Manajemen Sekolah: Teori dan Praktik*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 360

pendidikan mereka masing-masing khususnya masalah pembiayaan pendidikan, tanpa harus ketergantungan pada pembiayaan yang disediakan oleh pemerintah pusat melalui APBN-nya dan pemerintah daerah melalui APBD-nya yang tidak akan pernah mencukupi kebutuhan-kebutuhan pada satuan lembaga pendidikan dalam upaya menjadi suatu lembaga pendidikan yang bermutu dan berkualitas, dengan adanya komite sekolah diharapkan suatu lembaga atau satuan pendidikan tersebut dapat mandiri dan bermutu akhirnya.²⁸

Menurut Hasbullah komite sekolah dapat juga diartikan sebagai suatu badan atau lembaga non profit dan non politis, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para *stakeholder* pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan. Komite sekolah terdiri atas orang tua/wali murid, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dunia usaha/industri, organisasi profesi tenaga pendidikan/guru, wakil alumni, dan wakil dari siswa (khusus untuk SLTA). Anggota komite juga disebutkan sekurang-kurangnya berjumlah sembilan. Anggota komite dapat melibatkan dewan guru dan yayasan atau lembaga penyelenggara pendidikan maksimal berjumlah tiga orang. Syarat-syarat, hak, dan kewajiban, serta masa keanggotaan komite sekolah biasanya ditetapkan dalam Anggaran Dasar (AD) atau Anggaran Rumah Tangga (ART). Untuk penamaan badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing satuan pendidikan, seperti komite

²⁸*Ibid.*, hlm. 360-61

sekolah, majelis madrasah, majelis sekolah, komite TK, atau nama-nama lain yang disepakati bersama.²⁹

2. Tujuan Komite Sekolah

Sesuai dengan pengertiannya, tujuan, dan peran fungsi komite sekolah sangat ketergantungan pada masyarakat yang terlibat pada masyarakat itu sendiri, karena organisasi ini bersifat mandiri, demokrasi dan tidak terikat oleh organisasi manapun, artinya bahwa keefektifan dan keaktifan komite sekolah tergantung pada insan-insan yang bekerja sama dalam komite sekolah tersebut, ringkasnya komite sekolah harus memberdayakan dirinya sendiri sebelum memberdayakan sekolahnya.

Tujuan dibentuknya komite sekolah sebagai suatu organisasi masyarakat sekolah adalah:

1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.
2. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
3. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.³⁰

²⁹Hasbullah, *Otonomi Pendidikan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006), hlm. 90

³⁰Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, *Pemberdayaan Komite Sekolah*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2006), hlm. 4

Pembentukan komite sekolah dalam mewadahi dan menyalurkan aspirasi masyarakat maksudnya bahwa komite yang dibentuk dapat menampung keluhan-keluhan dan ide-ide masyarakat terhadap proses pendidikan yang perkembangannya tidak lepas dari pengaruh masyarakat. Setelah menampung berbagai macam keluhan dan pengaduan masyarakat tentang satuan pendidikan tertentu, selanjutnya keluhan dan pengaduan masyarakat yang bersifat positif dan membangun sekolah tersebut dikembangkan sedemikian rupa oleh komite sekolah, sehingga menjadi suatu kebijakan dalam perencanaan pendidikan.³¹

Selain menampung dan mewadahi aspirasi masyarakat, tujuan komite sekolah juga berupaya meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Masyarakat yang tadinya hanya selaku pengguna sekaligus penilai pendidikan dioptimalkan oleh komite sekolah untuk lebih bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan yang berada pada lingkungannya, sehingga masyarakat tidak hanya mengkritik dan menentang serta menyalahkan kebijakan-kebijakan pendidikan pada satuan lembaga pendidikan, melainkan mereka harus benar-benar bertanggung jawab akan kelangsungan pendidikan tersebut.

Kritikan yang dilontarkan masyarakat terhadap satuan pendidikan bukan hanya sekedar sebuah aspirasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan pengelola pendidikan saja, melainkan dengan adanya komite sekolah akan menjadikan

³¹Kompri, hlm. 365

masyarakat ikut bertanggung jawab akan kelangsungan pendidikan, singkatnya bahwa maju dan berkembangnya pendidikan tergantung pada masyarakat.

Tujuan pembentukan komite sekolah yang selanjutnya adalah menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan pendidikan. Salah satu faktor penyebab keengganan masyarakat dalam membantu pembiayaan penyelenggaraan pendidikan adalah tidak adanya kondisi yang transparan, akuntabel, dan demokratis antara pengelola pendidikan dengan masyarakat, mereka beranggapan bahwa banyaknya terjadi penyimpangan-penyimpangan dan penyalahgunaan dana (pembiayaan) pendidikan oleh pihak sekolah yang arahnya pada tindakan korupsi, sehingga mereka merasa enggan untuk membantu pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan yang mereka anggap percuma.³²

3. Peran Komite Sekolah

Keberadaan Komite Sekolah harus bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di satuan pendidikan/sekolah. Oleh karena itu, pembentukan Komite Sekolah harus memperhatikan pembagian peran sesuai posisi dan otonomi yang ada. Peran komite sekolah adalah:

- a. Sebagai lembaga pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan

³²*Ibid.*, hlm. 366

- b. Sebagai lembaga pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan.
- c. Sebagai lembaga pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan disatuan pendidikan.
- d. Sebagai lembaga mediator (*mediator agency*) antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.³³

Peran komite sekolah sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat sebagaimana dikemukakan diatas hanyalah merupakan acuan dasar saja, karena komite sekolah pada dasarnya lebih berhak memperluas perannya dengan tidak hanya sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat, melainkan komite sekolah juga dapat menjadi mediator antara pihak sekolah dengan masyarakat, donatur, pengusaha dan lain sebagainya.

³³Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, *Pemberdayaan Komite Sekolah*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2006), hlm. 4

4. Fungsi Komite Sekolah

Untuk menjalankan peran yang telah disebutkan diatas, Komite Sekolah memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- b. Melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha dan dunia industri dan pemerintah berkenaan dengan pendidikan yang bermutu.
- c. Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
 - 1) Kebijakan dan program pendidikan
 - 2) Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS)
 - 3) Kriteria kinerja satuan pendidikan
 - 4) Kriteria tenaga kependidikan
 - 5) Kriteria fasilitas pendidikan
 - 6) Hal-hal lain yang berkaitan dengan pendidikan
- d. Mendorong orangtua siswa dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan
- e. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan pendidikan di satuan pendidikan

- f. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran di satuan pendidikan.³⁴

5. Keanggotaan dan Kepengrusan Komite Sekolah

Keanggotaan komite sekolah berasal dari unsur-unsur yang ada dalam masyarakat. Disamping itu unsur dewan guru, yayasan atau lembaga penyelenggara pendidikan, Badan Pertimbangan Desa (BPD) dapat pula dilibatkan sebagai anggota komite sekolah. Jumlah anggota komite sekolah sekurang-kurangnya sembilan orang. Syarat-syarat, hak dan kewajiban, serta masa keanggotaan komite sekolah ditetapkan di dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).³⁵

Anggota komite sekurang-kurangnya atau minimal berjumlah 9 (Sembilan) orang atau lebih dengan catatan harus berjumlah ganjil atau memuat beberapa unsur yang terkait dengan peningkatan mutu pendidikan, diantaranya: unsur dewan guru, yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan, badan pertimbangan desa sebanyak-banyaknya berjumlah tiga orang. Sedangkan yang berasal dari masyarakat terdiri dari berbagai unsur sebagai berikut:

1. Perwakilan orang tua atau wali peserta didik berdasarkan jenjang kelas yang dipilih secara demokratis.
2. Tokoh masyarakat (ketua RT/RW/RK, kepala dusun, ulama, budayawan, pemuka adat)

³⁴*Ibid.*, hlm.4

³⁵Hasbullah, *Otonomi Pendidikan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006), hlm. 100

3. Anggota masyarakat yang mempunyai perhatian atau dijadikan figur dan mempunyai perhatian untuk meningkatkan mutu pendidikan.
4. Pejabat pemerintah setempat .
5. Dunia usaha/industri (pengusaha industry, jasa, asosiasi, dan lain-lain).
6. Pakar pendidikan yang mempunyai perhatian pada mutu pendidikan.
7. Organisasi profesi tenaga pendidikan (PGRI, ISPI, dan lain-lain).
8. Perwakilan siswa bagi tingkat SLTP/SMU/SMK/MTs/MA yang dipilih secara demokratis berdasarkan jenjang kelas.
9. Perwakilan forum alumni SD/MI, SLTP/MTs, dan SMU/SMK/MA yang telah dewasa dan mandiri.

Menurut Permendiknas pasal 4 dalam membentuk kepengurusan komite sekolah harus ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana berikut:

1. Orang tua/wali dari siswa yang masih aktif pada Sekolah yang bersangkutan paling banyak 50% (lima puluh persen).
2. Tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen), antara lain:
 - a) memiliki pekerjaan dan perilaku hidup yang dapat menjadi panutan bagi masyarakat setempat.
 - b) anggota/pengurus organisasi atau kelompok masyarakat peduli pendidikan, tidak termasuk anggota/pengurus organisasi profesi pendidik dan pengurus partai politik.
3. Pakar pendidikan paling banyak 30% (tiga puluh persen), antara lain:

- a) Pensiunan tenaga pendidik
- b) Orang yang memiliki pengalaman di bidang pendidikan.

Pembentukan kepengurusan komite sekolah tidak jauh berbeda dengan membentuk organisasi-organisasi lainnya, karena dalam pembentukan kepengurusan komite sekolah juga menekankan demokratisasi dan keterbukaan yang ditentukan oleh musra (musyawarah anggota), artinya bahwa pemimpin tertinggi dalam organisasi ini terletak pada hasil musyawarah anggota komite sekolah itu sendiri.

4. Mekanisme Pembentukan Komite Sekolah

Sebagaimana diketahui bahwa komite sekolah merupakan salah satu organisasi yang menutamakan transparansi, akuntabilitas dan demokratis, maka dalam pembentukan organisasi (komite sekolah) ini harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan demokratis. Artinya bahwa proses pembentukan komite sekolah harus bersifat terbuka, bertanggung jawab dan musyawarah mufakat serta diketahui oleh masyarakat secara menyeluruh, terutama masyarakat yang berada dalam lingkungan sekolah yang bersangkutan.

Proses awal pembentukan komite sekolah adalah dibentuknya panitia persiapan yang berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang yang berasal dari praktisi pendidikan, pemerhati pendidikan dan wali murid yang dibentuk oleh kepala satuan pendidikan (kepala sekolah) dan/atau masyarakat. Setelah terbentuknya panitia persiapan oleh kepala sekolah sebagaimana di atas, selanjutnya adalah bahwa panitia persiapan mempersiapkan segala hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme

pembentukan komite sekolah , baik yang bersifat finansial maupun nonfinansial dan dibentuk dengan langkah-langkah yang sesuai dengan aturan dan kemufakatan.³⁶

Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Mengadakan forum sosialisasi kepada masyarakat (termasuk pengurus/anggota BP3, majelis sekolah dan komite sekolah yang sudah ada) tentang komite sekolah.
2. Bekerja sama dengan masyarakat dalam menyusun kriteria dan mengidentifikasi calon anggota berdasarkan ketentuan keanggotaan yang telah ditetapkan dan di sesuaikan dengan kondisi wilayah dan budaya setempat.
3. Bekerja sama dengan masyarakat dalam menyeleksi calon anggota.
4. Mengumumkan nama-nama calon anggota yang telah di seleksi kepada masyarakat.
5. Menyusun nama-nama anggota terpilih.
6. Memfasilitasi pemilihan pengurus dan anggota komite sekolah atau nama lain yang di sepakati dalam musyaarah anggota.
7. Menyampaikan nama-nama anggota komite sekolah yang terpilih kepada kepala satuan pendidikan.³⁷

³⁶Kompri, hlm.374

³⁷*Ibid*, hlm. 375

B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Komite Sekolah

Faktor pendukung dan penghambat komite sekolah dalam implementasi komite sekolah :

1. Faktor Pendukung

- a. Penguatan kelembagaan komite sekolah
- b. Peningkatan kemampuan organisasional komite sekolah
- c. Menjalin kerja sama dengan komite sekolah dengan intitusi terkait
- d. Partisipasi orang tua murid

2. Faktor Penghambat

- a. Lemahnya sumber daya organisasi
- b. Kurangnya Penguatan kelembagaan komite sekolah
- c. Kurangnya kemampuan organisasional komite sekolah
- d. Lemahnya partisipasi orang tua murid

BAB III

GAMBARAN UMUM SEKOLAH SMP NEGERI 10 PALEMBANG

A. Sejarah Sekolah

Asal mula berdirinya SMP Negeri 10 Palembang dimulai pada tahun 1968. Awalnya SMP Negeri 03 Palembang dipecah kegiatan KBM-nya menjadi 2 kegiatan sekolah yaitu pagi dan sore. Untuk sekolah yang masuk sore diubah nama menjadi SMP Negeri 10 Palembang dengan Kepala Sekolah yang bernama A. Cholod Djonsampai dengan tahun 1976 dan lokasinya tetap berada di lokasi yang sama dengan SMP Negeri 03 Palembang.

Pada tahun 1977, SMP Negeri 10 Palembang pindah lokasi dan menempati gedung baru yang berlokasi di jalan rudus sekip ujung Palembang. Untuk kelas III (tiga), sementara kelas I (satu) dan II (dua) masih berlokasi / menumpang di SMP Negeri 03 Palembang.

B. Profil Sekolah

Adapun Profil dari SMP Negeri 10 Palembang adalah sebagai berikut :

Nama Sekolah : SMP Negeri 10 Palembang

NPSN : 10603087

NIS : 201116001012

Alamat : Jl. Rudus Sekip Ujung, Kelurahan : 20 Ilir D

Kecamatan : Kemuning

Kabupaten : Palembang

Provinsi : Sumatera Selatan

Kode Pos : 30127

No.Telp : 0711-354 401

Status Sekolah : Negeri

Tahun didirikan : 1965

Tahun beroperasi : 1976

Status tanah : Milik Pemerintah

Luas tanah : 5.000 m²

Nama Kepala Sekolah : Tony Sidabutar, M.Pd

NIP : 196302151993021002

Pendidikan Terakhir : S.2 (Magister Pendidikan) Jurusan Matematika

No. Hp : 081369370041

Mulai bertugas : 17 Juni 2013

Berdasarkan profil sekolah diatas penulis menganalisis sekolah SMP Negeri 10 Palembang berada di Jl. Rudus Sekip Ujung, Kelurahan : 20 Ilir D kecamatan Kemuning Kabupaten Palembang Provinsi Sumatera Selatan dan status sekolah adalah negeri, tahun didirikan sekolah ini pada tahun 1965 dan beroperasi pada tahun 1976.

C. Visi dan Misi

1. Visi

“ Berprestasi, Berbudi Pekerti Luhur dan Peduli Lingkungan”.

2. Misi

- a. Mengoptimalkan proses belajar dan mengajar berdasarkan kurikulum yang berlaku.
- b. Meningkatkan kemampuan intelektual siswa melalui kegiatan bimbingan belajar program perbaikan dan pengayaan serta KIR.

- c. Memberdayakan dan melengkapi sarana dan prasarana sekolah yang ada secara maksimal.
- d. Mengembangkan minat dan bakat siswa melalui kegiatan Ekstrakurikuler/Pengembangan diri.
- e. Melaksanakan kegiatan ibadah menurut agamanya masing-masing dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
- f. Membudayakan salam, senyum dan sapa dalam pergaulan dilingkungan sekolah masyarakat.
- g. Mempererat dan mengembangkan hubungan sekolah dengan masyarakat lingkungannya.
- h. Menciptakan lingkungan hidup di sekolah nyaman dan menyenangkan, sehingga peserta didik dapat tumbuh dan berkembang secara harmonis dan optimal sebagai sumber daya manusia yang berkualitas serta peduli lingkungan.
- i. Menciptakan suasana hidup bersih di lingkungan sekolah.
- j. Menghasilkan siswa yang mencintai budaya dan lingkungan.
- k. Menegakkan kedisiplinan terhadap peraturan yang berlaku.
- l. Mewujudkan sekolah sebagai Wiyata Mandala.

Berdasarkan visi dan misi yang sekolah terapkan penulis menganalisis visi dan misi yang diterapkan oleh sekolah SMP Negeri 10 Palembang sangat mengedepankan prestasi siswa dan berbudi luhur serta peduli akan lingkungan

D. Tugas Pokok dan Fungsi Karyawan

1. Kepala Sekolah

Pada umumnya kepala sekolah berfungsi dan bertanggung jawab sebagai berikut :

- a. Kepala sekolah sebagai educator, yaitu melaksanakan proses belajar mengajar secara efektif dan efisien.
- b. Kepala sekolah sebagai manajer, mempunyai tugas:
 - 1) Menyusun perencanaan
 - 2) Mengkoordinasikan kegiatan
 - 3) Mengarahkan kegiatan
 - 4) Melaksanakan pengawasan
- c. Kepala sekolah selaku administrator menyelenggarakan administrasi:
 - 1) Perencanaan
 - 2) Pengorganisasian
 - 3) Pengarahan
 - 4) Pengawasan
- d. Kepala sekolah selaku supervisor, bertugas menyelenggarakan supervisor mengenai:
 - 1) Proses belajar mengajar
 - 2) Kegiatan bimbingan konseling
 - 3) Kegiatan ekstrakurikuler
 - 4) Kegiatan katata usahaan

e. Kepala sekolah sebagai pemimpin/leader :

- 1) Dapat dipercaya, jujur, dan bertanggung jawab
- 2) Memahami kondisi guru, karyawan dan siswa.
- 3) Memiliki visi dan memahami misi sekolah
- 4) Mengambil keputusan urusan intern dan ekstern sekolah

f. Kepala sekolah sebagai innovator

Melakukan pembaharuan di bidang :

- 1) KBM
- 2) Bimbingan dan konseling
- 3) Ekstrakurikuler
- 4) Pengadaan
- 5) Melaksanakan pembinaan guru dan karyawan
- 6) Melakukan pembaharuan dalam menggali sumber daya di BP3 dan masyarakat.

g. Kepala sekolah sebagai motivator:

- 1) Mengatur ruang kantor yang kondusif untuk kerja
- 2) Mengatur ruang BK dan belajar mengajar
- 3) Mengatur ruang laboratorium yang kondusif untuk praktikum

Berdasarkan tugas pokok kepala sekolah yang telah dijelaskan diatas, peneliti menganalisis bahwa kepala sekolah mendapatkan tugas yang berkaitan dengan keberlangsungan sekolah selama jabatan yang telah diterimanya, meliputi sebagai

educator pelaksanaan proses pembelajaran, sebagai manajer, sebagai administrator yang bertugas melaksanakan administrasi dan sebagai supervisor. Kepala sekolah mencakup semua hal yang berkaitan dengan sekolah.

2. Wakil Kepala Sekolah

a. Wakil Kepala Sekolah Kurikulum

Pada umumnya tugas dari wakil kepala sekolah bagian kurikulum adalah membantu kepala sekolah dalam kegiatan sebagai berikut :

- 1) Menyusun dan menjabarkan kalender pendidikan
- 2) Menyusun pembagian tugas guru dan jadwal pembelajaran
- 3) Mengatur penyusunan program pengajaran
- 4) Mengatur mutasi siswa
- 5) Menyusun laporan

b. Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan

Pada umumnya tugas dari wakil kepala sekolah bagian kesiswaan adalah membantu kepala sekolah dalam kegiatan sebagai berikut :

- 1) Mengatur program dan pelaksanaan Bimbingan Konseling
- 2) pesantren kilat
- 3) Menyelenggarakan cerdas cermat, olahraga dan prestasi
- 4) Menyusun dan mengatur pelaksanaan pemilihan siswa teladan sekolah
- 5) Menyeleksi calon untuk diusulkan mendapat beasiswa

c. Wakil kepala sekolah Humas

- 1) Mengatur dan mengembangkan hubungan BP3 dan peran BP3
 - 2) Menyelenggarakan bakti sosial, karyawisata
 - 3) Menyelenggarakan pameran hasil pendidikan di sekolah
 - 4) Menyusun laporan
- d. Wakil kepala sekolah Sarana dan Prasarana
- 1) Perencanaan pengadaan alat dan bahan laboratorium
 - 2) Menyusun jadwal dan tata tertib penggunaan laboratorium
 - 3) Mengatur penyimpanan dan daftar alat-alat laboratorium.
 - 4) Memlihara dan perbaikan alat-alat sarana dan prasarana
 - 5) Menyusun laporan
- e. Wakil kepala sekolah peningkatan mutu
- 1) Mengelola bimbingan belajar sepuluh
 - 2) Menyelenggarakan Try Out Siswa
 - 3) Persiapan Olimpiade Siswa

Berdasarkan tugas pokok wakil kepala sekolah yang telah dijelaskan diatas, penulis dapat menganalisis tugas yang diberikan kepada wakil kepala sekolah ini diantaranya membantu kepala sekolah dalam hal kurikulum, kesiswaan, humas, sarana dan prasarana dan peningkatan mutu sekolah.

3. Guru

Tugas guru utama adalah mengajar dan mendidik, selaku pengajar, guru berusaha meningkatkan kualitas pembelajaran, terutama pada penguasaan materi pembelajaran. Selaku pendidik, guru berusaha mencerminkan setiap tingkah lakunya dapat dijadikan teladan oleh siswa. Selain itu guru dapat memberikan tuntunan dan bimbingan siswa sehingga dapat berubah menjadi insan dewasa dan bertanggung jawab baik kepada dirinya. Tuhan, sesama, negara dan lingkungannya. Secara terperinci ruang lingkup tugas guru adalah sebagai berikut :

- a. Membuat PROTA (Program Tahunan), PROSEM (Program Semester), SATPEL (Satuan Pembelajaran), RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) dan Silabus.
- b. Melaksanakan Proses Pembelajaran
- c. Melaksanakan proses evaluasi
- d. Melaksanakan proses pengukuran prestasi siswa
- e. Mengumpulkan, mengelola dan menyampaikan prestasi siswa kepada orang tua
- f. Melaksanakan kontrol kehadiran siswa dan tatap muka
- g. Membuat catatan khusus mengenai perkembangan siswa, terutama jika menjadi seorang wali kelas.
- h. Melaksanakan bimbingan dan konseling
- i. Membantu tugas kepala sekolah
- j. Melaksanakan rapat yang diselenggarakan oleh sekolah atau komite sekolah

4. Tugas Guru Mata Pelajaran

Guru mata pelajaran bidang studi merupakan tenaga edukatif yang bertanggung jawab dalam melaksanakan proses pembelajaran di dalam suatu bidang studi tertentu. Tugas dan tanggung jawab guru mata pelajaran adalah sebagai berikut :

- a. Membuat perangkat pembelajaran
- b. Melaksanakan kegiatan pembelajaran
- c. Melaksanakan kegiatan penilaian proses pembelajaran, ulangan harian, ulangan umum dan ujian akhir.
- d. Menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan
- e. Membuat alat pelajaran atau alat peraga
- f. Mengisi daftar nilai siswa
- g. Mengikuti kegiatan pengembangan pemasyarakatan kurikulum
- h. Membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar siswa
- i. Mengisi dan meneliti daftar hadir siswa sebelum memulai pelajaran
- j. Mengumpulkan dan menghitung angka kredit untuk kenaikan peringkat

Berdasarkan tugas pokok guru yang telah dijelaskan diatas penulis dapat menganalisis bahwa guru mendapatkan tugas yang berkaitan langsung dengan siswa mulai dari pembelajaran, melaksanakan bimbingan, dan membuat pengembangan program pembelajaran, tugas yang diberikan yang diberikan kepada guru ini lebih mengarah pada proses dan pengembangan belajar.

5. Tugas Wali Kelas

- a. Pengelolaan kelas lebih berkaitan dengan upaya-upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses pembelajaran (pembinaan raport, pemberian ganjaran, penghentian perilaku siswa yang menyelewengkan perhatian kelas, penyelesaian tugas oleh siswa secara tepat waktu).
- b. Perlengkapan administrasi sekolah yang meliputi : denah tempat duduk siswa, papan absensi kelas, daftar pelajaran kelas, daftar piket kelas, buku absensi siswa dan guru dan tata tertib siswa.
- c. Pengisian daftar kumpulan nilai siswa
- d. Pembuatan catatan khusus tentang siswa
- e. Pencatatan mutasi siswa
- f. Pengisian buku laporan penilaian hasil belajar siswa
- g. Pembagian buku laporan penilaian hasil belajar siswa

Berdasarkan tugas pokok yang diberikan kepada wali kelas, penulis menganalisis wali kelas bertugas mengatur dan mengelola kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Pengelolaan yang dilakukan wali kelas meliputi perlengkapan administrasi sekolah, pengisian daftar kumpulan nilai siswa, pembuatan catatan khusus tentang siswa, pencatatan mutasi siswa, pengisian buku laporan penilaian hasil belajar siswa, dan pembagian buku laporan penilaian hasil belajar siswa.

6. Tugas Guru Piket

Guru piket adalah guru yang melaksanakan piket di luar jam mengajar yaitu pada hari yang telah ditentukan oleh sekolah. Adapun tugas guru piket di SMP Negeri 10 Palembang adalah mencatat nama-nama siswa dan guru yang absen, izin dan sakit pada hari itu serta mengawasi kelancaran proses pembelajaran.

7. Tugas Guru Bimbingan dan Penyuluhan

Guru BP atau sekarang sering di kenal dengan sebutan guru BK (Bimbingan dan Konseling), adalah guru yang bertugas membantu siswa dalam memecahkan masalah siswa, baik yang bersifat pribadi dan masalah sekolah. Guru BP/BK juga memberikan pengarahan- pengarahan sebagai alternative dalam memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi oleh siswa, mengadakan hubungan baik dengan pihak orang tua atau wali murid maupun wali kelasnya.

8. Tugas Karyawan dan Petugas Lainnya

Pada dasarnya tugas utama seorang kepala tata usaha adalah membantu kepala sekolah dalam usaha mengkoordinasikan kegiatan katatausahaan sekolah.

E. Struktur Organisasi

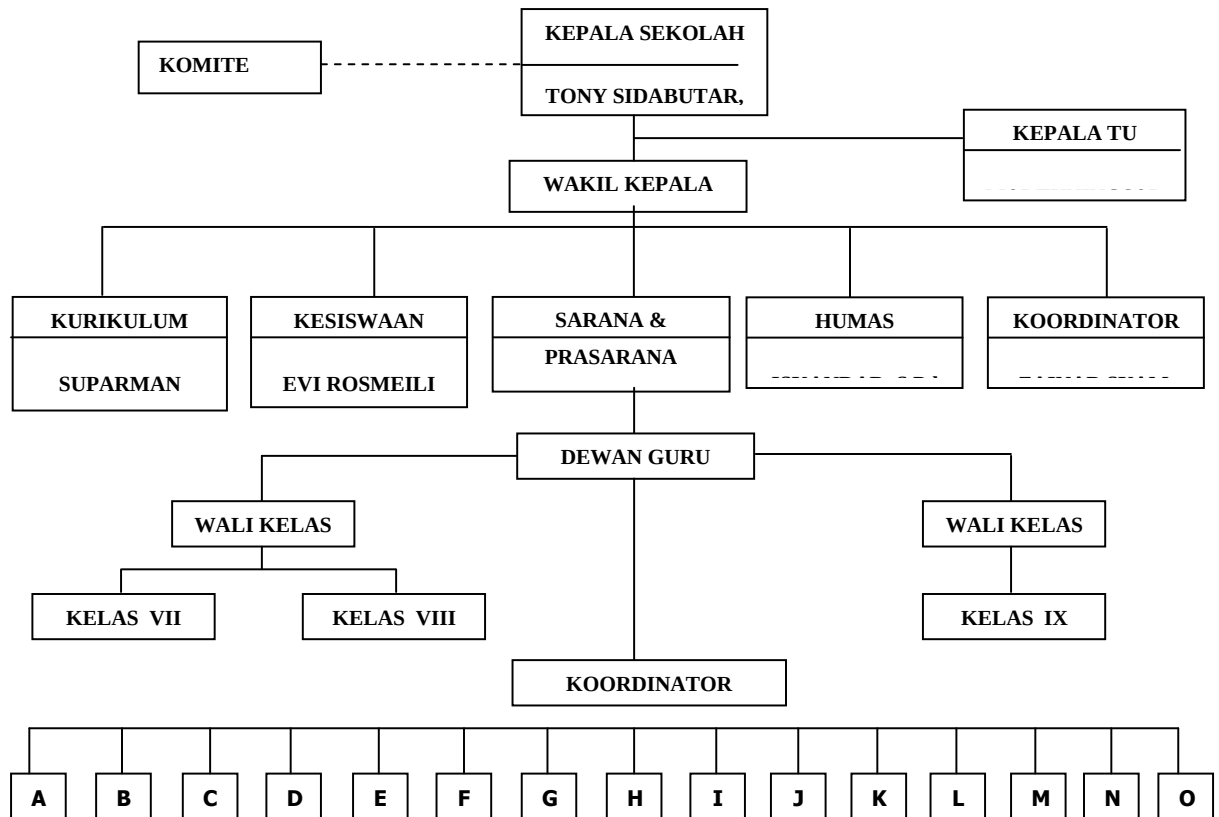
Struktur organisasi yang baik merupakan hal yang penting di dalam sekolah, dengan adanya struktur organisasi yang baik, maka tugas dan tanggung jawab di dalam suatu sekolah dapat di lihat dengan jelas, agar tujuan sekolah dapat dicapai dan terlaksana dengan maksimal, maka setiap kegiatan harus dilakukan bersama-sama. Bentuk kerja sama itu tercermin dalam struktur organisasi sekolah.

Adapun Struktur Organisasi SMP Negeri 10 Palembang dapat di lihat dari tabel sebagai berikut

Bagan 3.1

Struktur Organisasi

Lembaga Pendidikan SMP Negeri 10 Palembang



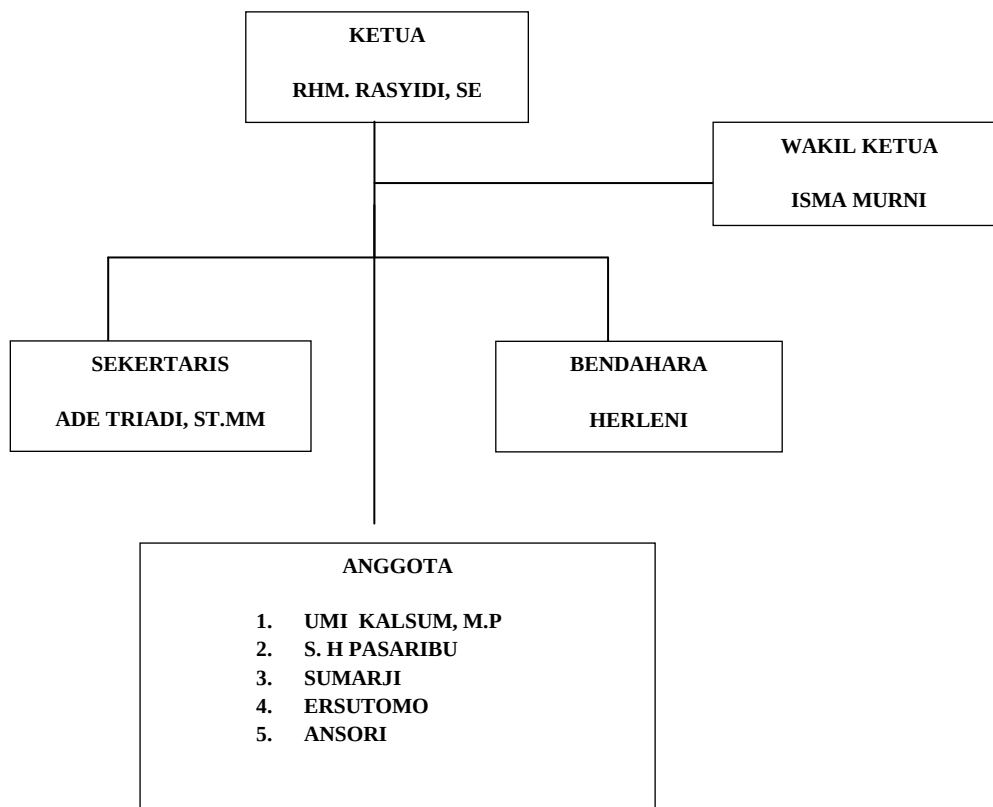
Sumber Dokumentasi SMP Negeri 10 Palembang Tahun 2017

Berdasarkan keterangan table diatas terlihat bahwa struktur organisasi kepengurusan pegawai di SMP Negeri 10 Palembang tampak sudah tersusun dengan rapi dan semuanya bekerja sesuai dengan jabatan/kedudukan masing-masing.

Bagan 3.2

Struktur Organisasi

Komite SMP Negeri 10 Palembang



Sumber Dokumentasi SMP Negeri 10 Palembang Tahun 2017

Dari keterangan tabel diatas terlihat bahwa struktur organiasi komite sekolah di SMP Negeri 10 Palembang sudah tersusun dengan baik, semuanya bekerja sesuai dengan kedudukannya. Seperti ketua komite sekolah sebagai atasan telah menjalankan perannya baik mengkoordinir semua bawahanya dalam menjalankan tugasnya.

F. Keadaan Guru

Table 3.1

Daftar Nama Guru dan Pegawai SMP Negeri 10 Palembang

No	Nama	Pendidikan	Guru Mapel
1	Tony Sidabutar, M.Pd	S.2 (P.MTK)	Kepala Sekolah/ Matematika
2	H.Iskandar,S.Pd	S.1 (fisika)	Fisika
3	Sanawiyah, S.Pd	S.1 (Sejarah)	Sejarah
4	Indriatika, S.Pd	S.1 (Sejarah)	Sejarah
5	Evi Rosmeili, S.Pd	S.1 (Bahasa Indo)	Bahasa Indo
6	Ernawati,S.Pd	S.1 (Sejarah)	Sejarah
7	Dra. Hj. Yulia Daswati	S.1 (PMP)	-
8	Dra. Risnawati	S.1 (BP)	BP
9	Hj. Siti Amah,S.Pd	S.1 (Biologi)	Biologi
10	Suanto,S.Pd.MM	S. 2 (Mas.Maj)	Biologi
11	Hj.Yulia Isnaini,S.Pd	S.1 (Fisika)	Fisika
12	Hj.Siti Balkis,S.Pd	S.1 (Bahasa Ingg)	Bahasa Inggris
13	Hayuniwati, A.Md	DIII (Biologi)	Biologi
14	Dra. Nuryati HN	S.1 (BK)	BK
15	Zainab Syam,S.Pd	S.1 (BP)	BP

16	Saida Sinaga,S.Pd	S.1 (Sejarah)	Sejarah
17	Lamah, S.Pd.	S.1 (Bahasa Indo)	Bahasa Indo
18	Rubandi,S.Pd	S.1 (MTK)	Matematika
19	Awaliah,S.Pd	S.1 (Bhs Indo)	Bahasa Indo
20	Hj.Siti Hosma,S.Pd	S.1 (Fisika)	Fisika
21	Titin Martina,S.Pd	S.1 (Bahasa Ing)	Bahasa Inggris
22	Husmini,S.Pd	S.1 (MTK)	Matematika
23	Sakdiah,S.Pd	S.1 (Sejarah)	Sejarah
24	Khomsiah,S.Pd	S.1 (Bahasa Indo)	Bahasa indo
25	Juwita, A.Md	DIII (Bhs Indo)	Bahasa Indo
26	Eryunani,S.Pd	S.1 (MTK)	Matematika
27	Anggraenni Yati, S.Pd.	S.1 (Akt-Eko)	-
28	Nontjik	DII (MTK)	Matematika
29	Erma Yuliani, S.Pd.	S.1 (Bahasa Indo)	Bahasa Indo
30	Ristu Aidi, S.Pd	S.1 (Penjas)	Penjas
31	Hj.Rahmawati,S.Pd	S.1 (Bahasa Ingg)	Bahasa Inggris
32	Fadjri, S.Pd	S.1 (BP)	Penjas
33	Eni Suprapti, S.Pd	S.1 (Bahasa Ing)	Bahasa Inggris
34	Sopbrizal	DI (Bahasa Indo)	Bahasa Indo
35	Masriah,A.Md	DIII (MTK)	Matematika
36	Mursidah, S.Pd	S.1 (BP)	BP

37	Rosmala Dewi, S.Pd	S.1 (MTK)	Matematika
38	Syamsiah, S.Pd.	S.1 (MTK)	Matematika
39	Hj.Nyimas Putri	PGSLTP (S.Rupa)	Seni Rupa
40	Emlawadalta	DIII (S.Tari)	Seni Tari
41	Sairah, S.Pd	S.1 (BK)	BK
42	Reni,S.Pd.M.Si	S.2 (ADM)	-
43	Suparman Sunaryo, S.Pd	S.1 (Bahasa Ing)	Bahasa Inggris
44	Prasetyo Budi Utomo,S.Pd	S.1 (S. Rupa)	Seni Rupa
45	Dirham, S.Pd	S.1 (Bahasa Indo)	Bahasa Indo
46	Dra. Sutiawati	S.1 (Tarb, Mat)	Matematika
47	Sirajuddin, S.Ag.M.Pd.I	S.2 (PAI)	PAI
48	Isra' Yuliani, S.Pd.	S.1 (Bahasa Ing)	Bahasa Inggris
49	Indah Saptarini, S.Pd	S.1 (Bahasa Ing)	Bahasa Inggris
50	Mety Triyanti, S.Pd	S.1 (Sejarah)	Sejarah
51	Tetie Framasiska,S.Pd	S.1 (Bahasa Indo)	Bahasa Indo
52	Melysa Ristianti, S.Pd	S.1 (Biologi)	Biologi
53	Rusdamin, S.Ag	S.1 (Usuld)	PAI
54	Halimatussadiyah, S.Pd.I	S.1 (PAI)	PAI
55	Ike Trisnawati, S.Pd	S.1 (Akun)	-
56	Dra. Roslina Dewi	S. 1 (I. Sek)	-

57	Yolandha Tri Putri,S.Pd	S. 1 (Matematika)	Matematika
58	Kms.Arufhikar Amin,S.Pd	S. 1 (Penjaskes)	Penjas
59	Nenin Febriyanti, S.Pd	S. 1 (Bahasa Indo)	Bahasa Indo
60	Rizki Amelia K ,S.Pd	S. 1 (PKN)	PKN
61	Retna Susanti, M.Sn	S. 2 (S. Bud)	Seni Budaya
62	Dian Anggraeni, S.Pd	S. 1 (PKN)	PKN
63	Abdul Hadi, S.Pd.I	S. 1 (PAI)	PAI
64	Fitria Ningsih S.Pd	S. 1 (Sejarah)	Sejarah
65	Deta Puji Kesuma,S.Pd	S. 1 (Matematika)	Matematika
66	Indri Oktaviana, S.Pd	S. 1 (Bahasa Indo)	Bahasa Indo
67	Edo Soaloon, S.Pd	S. 1 (S. Tasik)	Kesenian
68	Siti Mutiara Barokah, S.Pd	S. 1 (SBK)	SBK
69	Martuningsar, SH.	S. 1 (Hukum)	Kepala TU
70	A. Sepawi	SMTA	Bendahara
71	Ny. Fatimah	SMTA	Staff Tata Usaha
72	Dul Karim	SMTA	Bendahara
73	Yuliansyah	SMTA	Staff Tata Usaha
74	Syakdiah	SMTA	Perpustakaan
75	Agnes Nastasia	SMTA	Staff Tata Usaha
76	Levi	SMP	Penjaga Sekolah

77	M. Yayan Supena	SD	Satpam
78	Fahrudin	-	-
79	Kasmini	SMTA	-
80	Zainuddin	SMTA	Staff Tata Usaha
81	Sulistiwati, SH	S. 1 (Hukum)	Staff Tata Usaha
82	Nedi Junaidi	SMTA	Peg. Kebersihan
83	Amid Jahiron	SMTA	-
84	Andri Saputra, A.Md	DIII (Mj.Infor)	Operator Komp
85	Paulin Wulandari, M.Pd	S. 2 (Bahasa Ing)	Perpustakaan
86	Afriyanti Dewi, SE	S. 1 (Ekon.M)	-
87	Salamun Birohmatullah	SMTA	Satpam
88	Septa Rita, A.Md	DIII (Mj.Infor)	-
89	Wilujeng Retno Palupi, A.Md	DIII (Teknik.Elekt)	Perpustakaan
90	Nikmah	SMTA	-

Sumber Dokumentasi SMP Negeri 10 Palembang Tahun 2017

Berdasarkan tabel data guru dn pegawai SMP Negeri 10 Palembang diatas maka dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh guru di SMP Negeri 10 Palembang telah memenuhi kualifikasi yang sesuai dengan profesi guru yaitu dari 90 guru dan rata-rata berpendidikan S1.

G. Keadaan Siswa dan Guru

1. Data Siswa

Tabel 3.2

Data Siswa SMPNegeri 10 Palembang

Tahun Ajaran	Kelas VII		Kelas VIII		Kelas IX		Jumlah (Kls VII+VIII+IX)	
	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.
	Siswa	Rombel	Siswa	Rombel	Siswa	Rombel	Siswa	Rombel
2013/2014	477	12	303	8	335	9	1115	29
2014/2015	408	12	477	12	301	9	1258	33
2015/2016	392	10	470	12	466	12	1328	34
2016/2017	434	9	340	9	411	11	1185	29

Sumber Dokumentasi SMP Negeri 10 Palembang Tahun 2017

Setelah melihat tabel diatas penulis dapat menganalisa keadaan siswa di SMP Negeri 10 Palembang dilihat dari segi jumlahnya terlihat bahwa setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan.

2. Data Guru dan Pegawai

Tabel 3.3

**Data Guru dan Pegawai SMP Negeri 10 Palembang Tahun Ajaran 2016-
2017**

No	Jabatan	Pria	Wanita	Jumlah	Ket
1	Guru Tetap	12	45	57	-
2	Guru Tidak Tetap	2	12	14	-
3	Guru Bantu	0	0	0	-
4	Pegawai Tetap	5	4	8	-
5	Pegawai Tidak Tetap	6	7	13	-
Jumlah		23	68	93	93

Sumber Dokumentasi SMP Negeri 10 Palembang Tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas penulis dapat menganalisis bahwa data guru dan pegawai yang ada di SM negeri 10 Palembang diantaranya 57 guru tetap, 14 guru tidak tetap, 8 pegawai tetap dan 13 pegawai tidak tetap.

H. Keadaan Sarana dan Prasarana

Tabel 3.4

Keadaan Sarana dan Prasarana SMP Negeri 10 Palembang

Jenis Ruang	Jumlah	Ukuran (m2)	Jenis Ruang	Jumlah	Ukuran (m2)
Perpustakaan	1	120	Bank Sampah	1	
Lab IPA	1	12s1	Dapur	1	
Gudang	1		Musholah	1	
Kantin	1		Ruang Ganti Siswa	1	
Ruang 3R	1				

Sumber Dokumentasi SMP Negeri 10 Palembang Tahun 2017

Setelah melihat melihat tabel diatas dapat dipahami bahwa kedaan sarana dan prasarana SMP Negeri 10 Palembang dapat dikategorikan cukup lengkap untuk mendukung keberhasilan proses belajar mengajar di SMP Negeri 10 Palembang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Komite Sekolah di SMP Negeri 10 Palembang

Sebagai salah satu pelaksanaan otonomi pendidikan yang merupakan salah satu bagian dari otonomi daerah, maka untuk meningkatkan peran serta masyarakat di bidang pendidikan, diperlukan wadah untuk mengakomodasi pandangan, aspirasi, dan menggali potensi masyarakat. Salah satu wadah tersebut adalah dewan pendidikan di tingkat kota dan komite sekolah di tingkat satuan pendidikan. Dengan adanya komite sekolah dapat membuka peluang masyarakat untuk ikut berperan serta dalam wujud pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Komite sekolah sebagai badan mandiri yang diberi kebijakan dari pemerintah untuk kewenangannya dalam membantu, mengawasi, dan ikut merencanakan, mengelola, melaksanakan, sampai dengan program sekolah.

Selain mengawasi dan memfasilitasi, komite sekolah juga mempunyai peran dalam memberikan keputusan dari program yang disusun dan akan dilaksanakan. Dengan demikian komite sekolah tidak mempunyai program-program khusus dalam meningkatkan proses pendidikan melainkan komite sekolah dan pihak sekolah merencanakan program-program kerja secara bersama-sama. Komite sekolah di SMP Negeri 10 Palembang juga sebagai evaluator dalam pelaksanaan program, dan ikut serta dalam membantu dalam menyelesaikan masalah yang ada di sekolah, baik masalah yang dihadapi meliputi proses belajar mengajar, kelengkapan sarana

prasarana sekolah, kesejahteraan guru, dan pendanaan yang berhubungan dengan peningkatan proses pendidikan yang ada di sekolah.

1. Komite Sekolah sebagai Pemberi Pertimbangan

Sebagai bentuk pelaksanaan otonomi pendidikan yang merupakan salah satu bagian dari otonomi daerah, maka untuk meningkatkan peran serta masyarakat di bidang pendidikan, diperlukan suatu wadah yang dapat mengakomodasi pandangan, aspirasi dan menggali potensi masyarakat untuk menjamin terciptanya demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas pendidikan. Salah satu wadah tersebut adalah dewan pendidikan ditingkat Kabupaten atau Kota dan komite sekolah di tingkat satuan pendidikan. Komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan artinya komite sekolah harus mendukung usaha-usaha sekolah atau sekolah, khususnya yang berkaitan dengan pendanaan atau finansial sekolah atau demi berlangsungnya pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ketua komite sekolah mengungkapkan bahwa:

“Komite sebagai lembaga pemberi pertimbangan harus ikut serta dalam memberikan masukan dalam penyusunan RAPBS, penyelenggaraan rapat RAPBS, memberikan pertimbangan perubahan RAPBS, serta mengesahkan RAPBS. Dengan begitu masyarakat atau orang tua murid dapat tahu dana yang digunakan dan kebutuhan yang diperlukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Selain itu komite sekolah memberikan pertimbangan

dan masukan kepada sekolah dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengeloaan sumber daya pendidikan”³⁸

Adapun hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap guru tentang dalam implementasi komite sekolah dilihat dari komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan, mengemukakan:

“Memang benar komite sekolah sebagai badan mandiri yang diberi kebijakan oleh pemerintah untuk kewenangannya dalam membantu, mengawasi, dan ikut serta dalam merencanakan, mengelola, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pendidikan ataupun program kerja di sekolah. Dalam hal ini setiap awal tahun ajaran di SMP Negeri 10 Palembang adanya RAKS dan disampaikan kepada orang tua murid melalui komite sekolah.”³⁹

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, komite sebagai pemberi pertimbangan sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari komite sekolah ikut serta dalam memberikan masukan, perubahan, dan pengesahan RAPBS. Selain itu komite ikut serta dalam memberikan masukan terhadap proses pendidikan. Keterlibatan pemberian pertimbangan oleh komite sekolah, berupa tindakan koreksi dan tindakan perubahanyng diperlukan, dan pengesahan RAPBS menjadi APBS. Tindakan koreksi antara lain dalam RAPBS yang disusun kan memberatkan orang tua/ wali murid.

Dalam pelaksanaan program sekolah, komite sekolah berkoordinasi dengan Kepala Sekolah memberikan pertimbangan dlam memberikan masukan berupa, proses penerimaan peserta didik baru, proses pembelajaran, dan cara bekerja lebih

³⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak RHM Rasyidi selaku Ketua Komite di SMP Negeri 10 Palembang tanggal 13 Maret 2018 (Selasa, 10:15 WIB)

³⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Rusdamin, selaku guru di SMP Negeri 10 Palembang tanggal 12 Maret 2018 (Senin, 11.00 WIB)

baik. Sedangkan dalam pengelolaan sumber daya pendidikan, Komite Sekolah SMP Negeri 10 Palembang melakukan identifikasi peluang sumber daya pendidikan yang dapat digali untuk pendanaan sarana dan prasarana.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti dapat mengemukakan tentang implementasi komite sekolah dilihat dari komite sebagai pertimbangan di SMP Negeri 10 Palembang sudah cukup baik. Dengan diberikannya tugas dan fungsi komite sekolah yang jelas dan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan sumber daya pendidikan berjalan sebagaimana mestinya. Karena pada dasarnya peran komite sangat penting dalam penyelenggaran program dan kebijakan di SMP Negeri 10 Palembang sebagai salah satu sekolah unggulan yang telah mengotimalkan keberadaan komite sekolah di SMP Negeri 10 Palembang.

2. Komite Sekolah sebagai Pendukung

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan ketua komite sekolah tentang implementasi komite sekolah dilihat dari komite sebagai badan pendukung, mengungkapkan:

“Dalam menunjang keberhasilan penyelenggara pendidikan komite sekolah memberikan dukungan berupa pemikiran, pembiayaan, sarana prasarana maupun dukungan berupa tenaga. Komite sekolah sebagai badan pendukung dalam pengelolaan sarana dan prasarana memantau sarana dan prasarana yang ada di sekolah dan memobilisasi bantuan sarana prasarana di sekolah”⁴⁰

⁴⁰Hasil Wawancara dengan Bapak RHM Rasyidi selaku Ketua Komite di SMP Negeri 10 Palembang tanggal 13 Maret 2018 (Selasa, 10:15 WIB)

Menurut wawancara dengan guru tentang implementasi komite sekolah dilihat dari komite sekolah sebagai pendukung mengungkapkan.

“yang dilakukan komite sekolah adalah dengan monitoring pelaksanaan program, serta memfasilitasi untuk peningkatan SDM (sumber daya manusia). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bagi guru, selain itu agar proses pendidikan atau proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Biasanya komite sekolah mengadakan rapat untuk membahas tentang peningkatan kualitas pembelajaran bagi guru dan proses belajar mengajar”⁴¹

Berdasarkan kedua hal yang telah dikemukakan oleh ketua komite sekolah dan guru dalam implementasi komite sekolah dilihat dari komite sebagai badan pendukung di SMP Negeri 10 Palembang yaitu dengan mendukung dan memaksimalkan anggaran operasional dana BOS dengan menetapkan program dan kegiatan, semua program yang ada di SMP Negeri 10 Palembang, program tersebut telah dibuat dan direncanakan oleh kepala sekolah dan pihak komite sekolah dengan melalui rapat bersama.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa implementasi komite sekolah dengan memberikan dukungan dalam memaksimalkan anggaran operasional dana BOS dengan menentukan program dan kegiatan, selain itu dalam meningkatkan penyelenggaraan pendidikan komite sekolah SMP Negeri 10 Palembang memberikan dukungan berupa masalah pembiayaan, pendanaan kegiatan IMTAQ, dan sarana komputer. Selain itu komite sekolah juga membangun jejaring dengan instansi lain.

⁴¹Hasil Wawancara dengan Bapak Rusdamin, selaku guru di SMP Negeri 10 Palembang tanggal 12 Maret 2018 (Senin, 11.00 WIB)

Sebagai badan pendukung dalam pengelolaan sarana dan prasarana, komite SMP Negeri 10 Palembang memantau kondisi sarana dan prasarana disekolah, pemantauan tersebut dilakukan dengan melihat fisik sarana dan prasarana, memantau jumlah siswa, kebutuhan ruang untuk praktek belajar mengajar dan menerima laporan dari pihak sekolah mengenai kondisi sarana dan prasarana di SMP Negeri 10 Palembang.

Sedangkan dalam hal pengelolaan anggaran, komite sekolah memantau kondisi anggaran apabila sekolah memberikan laporan atau menyampaikan keluhan mengenai anggaran sekolah, kemudian memobilisasi terhadap anggaran. Upaya yang dilakukan dengan mencari dana bantuan ke dinas pemerintah, pihak lain, atau dengan melakukan komunikasi dengan orang tua atau wali siswa. Hal ini juga dilakukan dengan berkoordinasi dengan pihak sekolah. Koordinasi yang dilakukan dengan bermusyawarah antara komite dengan pihak sekolah mengenai bantuan anggaran dari berbagai pihak. Selain itu, pelaksanaan dukungan anggaran di sekolah diperlukan adanya evaluasi berupa laporan yng di berikan pihak sekolah kepada komite sekolah.

Dari hasil yang telah peneliti lakukan maka peneliti dapat mengungkapkan bahwa implementasi komite sekolah dilihat dari komite sebagai badan pendukung yaitu dengan memberikan dukungan berupa pemikiran yang berupa memberikan masukan dalam menentukan dan merancang RAPBS, memberikan dukungan berupa sarana dengan memfasilitasi untuk peningkatan sumber daya manusia

(SDM) dan dukungan berupa pembiayaan dan sarana komputer yang dapat dimanfaatkan untuk proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah tersebut.

3. Komite Sekolah sebagai Pengontrol

Sebagai pengontrol keberadaan komite sekolah akan menciptakan situasi yang transparan dan akuntabel antara pihak sekolah dengan masyarakat dalam penyelenggaraan dan penggunaan pembiayaan pendidikan. Kebijakan dan hasil usaha yang telah dilakukan komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan khususnya dalam proses pendidikan dan dalam membantu dalam pembiayaan pendidikan pada sekolah tersebut tidak hanya diserahkan sepenuhnya oleh pihak pengelola pendidikan, namun pelaksanaan kebijakan dan penggunaan pembiayaan tersebut tidak lepas dari kontrol komite sekolah, sehingga terhindarnya penyalahgunaan kebijakan dan pembiayaan pendidikan pada sekolah tersebut.

Dalam melakukan kontrol sekolah, dalam secara resmi komite sekolah mengadakan pengontrolan atau pengawasan, dari hasil wawancara yang dilakukan dengan ketua komite sekolah mengungkapkan :

“Sebagai badan pengontrol, komite sekolah berperan dalam dua hal yaitu transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Dalam melakukan pengontrolan atau pengawasan di sekolah komite melakukan pengontrolan selama 2 kali dalam setahun, pengontrolan tersebut dilakukan pada awal tahun pelajaran dan akhir tahun pelajaran. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana sekolah dalam menjalankan program dan kegiatan dan untuk mengetahui

apakah dalam melaksanakan program terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pihak sekolah”⁴²

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala sekolah, mengungkapkan.

“Dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana program-program kerja sudah dilaksanakan oleh pihak sekolah, komite sekolah melakukan pengontrolan baik secara resmi maupun tidak resmi. Setiap kebijakan, program, dan penyelenggaraan pendidikan di sekolah perlu adanya pengawasan dari pihak komite sekolah. Karena salah satu dari fungsi komite yaitu mengevaluasi dan mengawasi program-program yang berjalan di satuan pendidikan.”⁴³

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti implementasi komite sekolah melakukan pengontrolan selama 2x dalam setahun. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam proses penyelenggaraan pendidikan, proses pengelolaan program sekolah dan proses belajar mengajar.

Sebagai pengontrol transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan, komite sekolah berperan dalam hal kebijakan yang dibuat oleh sekolah, hanya sebatas pada kebijakan yang berkaitan dengan program pembangunan, dalam penyelenggaraan pendidikan yang berkaitan dengan pengawasan perencanaan keuangan dengan memberikan pertimbangan dan saran dalam penyusunan RAPBS, untuk aloasi anggaran kegiatan belajar mengajar komite sekolah menyerahkan kepada pihak sekolah sepenuhnya, pengawasan

⁴²Hasil Wawancara dengan Bapak RHM Rasyidi, selaku Ketua Komite di SMP Negeri 10 Palembang tanggal 13 Maret 2018 (Selasa, 10:15 WIB)

⁴³Hasil wawancara dengan bapak Tony Sidabutar, selaku Kepala Sekolah di SMP Negeri 10 Palembang tanggal 13 Maret 2018 (Selasa, 11:30 WIB)

terhadap kualitas program dilakukan dengan menanyakan bagaimana pelaksanaan program sekolah.

Dalm proses perencanaan pendidikan komite sekolah belum mengontrol secara keseluruhan. Hal tersebut disebabkan karena keterbatasan waktu yang dimiliki oleh beberapa anggota komite sekolah khususnya yang berasal dari unsur masyarakat. Namun komite sekolah tetap mengontrol dan mengawasi kegiatan penyelenggraan pendidikan yang ada di sekolah. Seperti yang telah dijelaskan oleh kepala sekolah dan ketua komite sekolah diatas, bahwa kegiatan pengontrolan dilakukan selama2 kali dalam setahun.

Komite sekolah sebagai badan pengontrol di SMP Negeri 10 Palembang sudah sangat maksimal, karena dengan adanya pengontrolan yang dilakukan selama setahun 2x tersebut komite sekolah dapat mengetahui sejauh mana pihak sekolah dalam melaksanakan program-program yang ada di sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan guru tentang implementasi komite sekolah dilihat dari komite sebagai badan pengontrol, menungkapkan:

“Komite sekolah dalam hal ini memiliki tanggung jawab lebih sebagai badan pengontrol, dan apabila rencana sudah disepakati maka selanjutnya dikoordinasikan dengan orangtua murid”⁴⁴

⁴⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Rusdamin, selaku guru di SMP Negeri 10 Palembang tanggal 12 Maret 2018 (Senin, 11.00 WIB)

Dari hasil yang telah dijelaskan diatas peneliti mengemukakan bahwa komite sekolah sebagai pengontrol di sekolah SMP Negeri 10 Palembang bertujuan agar komite sekolah mengetahui sejauh mana program yang telah terlaksana, selain itu agar terciptanya penyelenggaraan pendidikan yang bersifat taransparan dan akuntabilitas.

4. Komite Sekolah sebagai Mediator

Komite sekolah pada dasarnya lebih berhak memperluas perannya dengan tidak hanya sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat, melainkan komite sekolah juga menjadi mediator antara pihak sekolah dengan masyarakat, donatur, pengusaha, dan lain sabagainya. Sehingga dengan demikian sumber dana komite sekolah tidak hanya diperoleh dari pemerintah yang anggrannya tidak akan pernah mencukupi pembiyaan pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan, namun akan ada beberapa sumber yang nantinya akan berdampak pada terpenuhinya standar minimal pembiayaan pendidikan dan/lebih, sehingga berdampak pada peningkatan mutu khususnya proses pendidikan secara menyeluruh. Konsep atau acuan sebagai mediator diatas lebih mengarah pada permasalahan formal antara masyarakat dan pemerintah, contohnya masalah pencairan dana dari pemerintah dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ketua komite sekolah tentang komite sebagai mediator mengungkapkan :

“Komite sekolah dalam hal ini berkomunikasi dengan orang tua murid, wali siswa atau masyarakat. Komite dan pihak sekolah bisa langsung mengundang orangtua murid untuk datang ke sekolah bila ada hal-hal yang perlu di musyawarahkan dengan orang tua murid baik hambatan-hambatan yang dihadapi oleh sekolah dalam proses pendidikan atau pun penyelenggaraan pendidikan, karena dalam perannya komite sebagai mediator adalah komite sekolah sebagai badan penghubung antara pemerintah dengan masyarakat di satuan pendidikan”⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah tentang implementasi komite sekolah, dilihat dari komite sebagai mediator

“Dalam hal ini komite sekolah menjadi jembatan antara orangtua murid dan pihak sekolah, upaya yang dilakukan komite sekolah yaitu dengan mengadakan sosialisasi pada semester ganjil dan semester genap dan juga sosialisasi UNBK. Sosialisasi dilakukan dengan mendatangkan orang tua murid dan dengan berembuk atau musyawarah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan khususnya peningkatan proses pendidikan”⁴⁶

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti yang berkaitan dengan implementasi komite sekolah dilihat dari komite sebagai mediator yaitu komite sekolah sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat ataupun mediator antara sekolah dengan masyarakat, donatur, ataupun pengusaha sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat adanya kerja sama antara komite sekolah dengan donatur untuk menunjang peningkatan proses pendidikan atau proses belajar mengajar.

Sebagai badan penghubung dalam pelaksanaan program, komite sekolah mensosialisasikan kebijakan dan program sekolah dalam rapat pleno kepada orang

⁴⁵Hasil Wawancara dengan Bapak RHM Rasyidis selaku Ketua Komite di SMP Negeri 10 Palembang tanggal 13 Maret 2018 (Selasa, 10:15 WIB)

⁴⁶ Hasil wawancara dengan bapak Tony Sidabutar selaku Kepala Sekolah di SMP Negeri 10 Palembang tanggal 13 Maret 2018 (Selasa, 11:30 WIB)

tua/wali murid, kepada masyarakat dilingkungan tempat tinggal dan menyelenggarakan rapat pleno yang memungkinkan orang tua/ wali murid menyampaikan keluhan menegnaik kebijakan dan program sekolah, dan menghimbau kepada orang tua/wali murid untuk menyampaikan keluhannya langsung ke pihak sekolah atau melalui komite sekolah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti diatas maka penulis dapat mengemukakan komite sekolah sebagai mediator di SMP Negeri 10 Palembang sudah cukup baik, karena dengan bentuk inilah masyarakat dapat menyalurkan aspirasi atau ide-idenya untuk kemajuan sekolah dan peningkatan penyelenggaraan pendidikan. Selain itu, dengan adanya program yang dilakukan komite sekolah dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah tersebut.

Namun untuk berkomunikasi langsung dengan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dilakukan oleh pihak sekolah itu sendiri, komite sekolah hanya menerima laporan dari hasil komunikasi antara pihak sekolah dengan pemerintah kemudian komite sekolah menyampaikan hasil laporan tersebut kepada masyarakat.

B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Komite Sekolah di SMP Negeri 10 Palembang

Dalam implementasi komite sekolah tentunya memiliki faktor Pendukung dan penghambat. Faktor pendukung merupakan hal yang paling penting dalam meningkatkan mutu pendidikan terutama pihak komite maupun pihak lembaga pendidikan.

Adapun faktor pendukung dan penghambat implementasi komite sekolah, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung implemtasi komite sekolah adalah a) Penguatan kemampuan organisasional komite sekolah, b) Menjalin kerjasama komite sekolah dengan institusi terkait, c) kemampuan Organisasional komite sekolah, d) Partisipasi orang tua murid. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan ketua komite sekolah, komite sekolah mengungkapkan :

“Ada beberapa faktor yang menjadi pendukung implementasi komite sekolah. Faktor tersebut diantaranya dengan menjalin kerjasama dengan institusi terkait, selain itu hubungan sekolah yang harmonis dengan stakeholder terutama wali murid”⁴⁷

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan ketua komite sekolah maka penulis dapat mengemukakan faktor pendukung implementasi komite sekolah yang ada di SMP Negeri 10 Palembang.

⁴⁷Hasil Wawancara dengan Bapak RHM Rasyidi selaku Ketua Komite di SMP Negeri 10 Palembang tanggal 13 Maret 2018 (Selasa, 10:15 WIB)

a. Penguatan Kelembagaan Komite Sekolah

Ada tujuh langkah baku pembentukan komite sekolah, yaitu, 1) melakukan (forum) sosialisasi pembentukan komite, 2) menyusun kriteria dan identifikasi bakal calon anggota (berdasarkan usulan masyarakat), 3) seleksi anggota berdasarkan kriteria, 4) pengumuman nama-nama bakal calon anggota guna menampung bila ada keberatan terhadap satu atau lebih bakal calon, 5) pengumuman nama-nama calon yang sudah di sepakati masyarakat, 6) pemilihan komite sekolah berdasarkan musyawarah mufakat atau atau pungutan suara, dan 7) penyampaian nama-nama komite sekolah terpilih. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ketua komite sekolah tentang penguatan kelembagaan komite sekolah mengungkapkan:

“Penguatan kelembagaan komite sekolah dilakukan dengan membentuk masing-masing anggota, dari ketua komite sekolah, wakil ketua, sekertaris, dan bendahara. Hal ini bertujuan agar, masing-masing anggota dapat melaksanakan peran dan fungsinya. Setiap anggota dapat memanfaatkan keahliannya dalam melaksanakan program kerja.”⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan guru tentang penguatan kelembagaan komite sekolah sebagai berikut:

“Menurut saya penguatan kelembagaan komite sekolah itu sudah maksimal selain itu ada inisiatif yang perlu diapresiasi bagi pihak sekolah dan guru bagi komite. Karena komite sudah menjalankan peran dan fungsinya sebagai pemantau proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar.”⁴⁹

⁴⁸Hasil Wawancara dengan Bapak RHM Rasyidi selaku Ketua Komite di SMP Negeri 10 Palembang tanggal 13 Maret 2018 (Selasa, 10:15 WIB)

⁴⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Rusdamin, selaku guru di SMP Negeri 10 Palembang tanggal 12 Maret 2018 (Senin, 11.00 WIB)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diatas maka peneliti dapat mengemukakan tentang penguatan kelembagaan komite sekolah sudah cukup baik. Selain itu pengurus komite sekolah menjalankan peran dan fungsinya dalam memantau implementasi komite sekolah yang ada di SMP Negeri 10 Palembang.

b. Kemampuan Organisasional Komite Sekolah

Agar program organisasi dan manajemen komite sekolah bisa berjalan dengan baik maka fungsionaris organisasi itu harus membangun kinerja dalam satu Teamwork. Sifat teamwork adalah anggota tim secara aktif bekerja sama sedemikian rupa sehingga keahlian masing-masing dimanfaatkan untuk mencapai tujuan bersama. Ciri-ciri anggota yang baik, adalah: 1) memberi semangat pada anggota tim yang lain untuk berkembang, 2) respek dan toleran terhadap pendapat berbeda dari orang lain; 3) mengakui dan bekerja melalui konflik secara terbuka, 4) mempertimbangkan dan menggunakan ide dan saran dari orang lain, 5) membuka diri terhadap masukan (feedback) atas perilaku dirinya, 6) mengerti dan bertekad memenuhi tujuan dari tim. Selain dalam upaya peningkatan kemampuan organisasional komite terdapat aspek penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Komite Sekolah harus berperan aktif dalam proses penyusunan RPS. Sedangkan konsep rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) adalah meliputi: 1) latar belakang; 2) gambaran pendidikan dan non pendidikan tahun

sebelumnya; 3) permasalahan kedepan yang dihadapi sekolah; 4) visi dan misi sekolah; 4) tujuan/ perubahan yang diinginkan; 5) indikator keberhasilan; 6) rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah tahun pelajaran; 7) lampiran-lampiran. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ketua komite sekolah tentang peningkatan kemampuan organisasional komite sekolah mengungkapkan:

“Dengan adanya sifat demokratis dan transparan dalam mengembangkan wacana hal tersebut memungkinkan semua anggota komite sekolah ikut serta dalam melaksanakan program”⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan guru di sekolah tentang peningkatan kemampuan organisasional komite sekolah sebagai berikut :

“Dalam peningkatan kemampuan organisasional komite sekolah untuk mendukung dan melaksanakan program diperlukannya sifat demokratis dan transparan. Karena hal tersebut dapat menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pengelola pendidikan”⁵¹

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diatas maka peneliti dapat mengemukakan tentang kemampuan organisasional komite sudah cukup baik dengan adanya kerja tim yang baik antar pengurus komite sehingga dalam melaksanakan setiap program dapat berjalan dengan baik. Anggota komite sekolah secara aktif bekerja sama dengan memanfaatkan keahliannya masing-masing sehingga dapat dengan mudah mencapai tujuan bersama. Selain itu, pengurus sifat

⁵⁰Hasil Wawancara dengan Bapak RHM Rasyidi selaku Ketua Komite di SMP Negeri 10 Palembang tanggal 13 Maret 2018 (Selasa, 10:15 WIB)

⁵¹Hasil Wawancara dengan Bapak Rusdamin, selaku guru di SMP Negeri 10 Palembang tanggal 12 Maret 2018 (Senin, 11.00 WIB)

demokratis dan transparansi juga sangat diperlukan dalam penguatan organisasional komite sekolah. Kerena dengan adanya sifat demokratis dan transparan dapat menciptakan kepercayaan dari masyarakat terhadap komite sekolah atau pengelola pendidikan.

c. Menjalin Kerjasama Komite dengan Institusi Terkait

Unsur-unsur yang membentuk komitas sekolah adalah terdiri dari individu dan kelompok, kelompok dalam satuan pendidikan, orang tua dan keluarga serta masyarakat di sekitar satuan pendidikan tersebut. Unsur-unsur tersebut harus terbangun jalinan hubungan kemitraan secara sistematis. Prinsip kerjasama adalah 1) saling membutuhkan 2) saling mempercayai 3) saling menguntungkan (memberi manfaat) dan 4) dilandasi kemitraan dan semangat untuk kepentingan bersama. Hubungan kerjasama komite sekolah dengan institusi terkait dilakukan dalam koridor channeling program pendidikan. Kerjasama penyaluran (*channeling*) program pendidikan adalah suatu bentuk kegiatan kerjasama yang dilakukan komite sekolah dengan pihak lain (swasta, pemerintah, lembaga peduli pengembangan pendidikan) yang berlandaskan kemitraan dan kepentingan bersama dalam rangka mencapai tujuan peningkatan mutu layanan pendidikan untuk rakyat tidak mampu.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ketua komite sekolah tentang menjalin hubungan kerja sama dengan institusi terkait mengungkapkan :

“Salah satu kerjasama yang dijalin oleh komite sekolah adalah dengan mempunyai network dengan perusahaan-perusahaan ternama, sehingga

dengan mudah mencari sponsorsip untuk pendanaan program kegiatan komite sekolah ataupun program kegiatan kegiatan sekolah. Baru-baru ini komite sekolah bekerja sama dengan Bank Sumsel Babel dalam kegiatan Imtaq’’⁵²

Dan dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan kepala sekolah tentang kerja sama antara komite sekolah dengan institusi terkait mengemukakan:

“Memang benar dalam melaksanakan program kegiatan diperlukan kerja sama dengan masyarakat baik perorangan, organisasi, dunia usaha maupun dunia industri’’⁵³

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti yang berkaitan implementasi komite sekolah, saya melihat adanya kerjasama yang baik dengan perusahaan-perusahaan ternama untuk menunjang keberhasilan proses pendidikan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat mengemukakan kerja sama antara komite sekolah dengan intitusi lain dapat membantu dalam melaksanakan program, baik berupa pemikiran, tenaga, maupun dana. Karena tanpa adanya dukungan ataupun kerja sama dengan berbagai pihak, mustahil kegitan-kegitan komite sekolah dapat berjalan dengan lancar.

⁵²Hasil Wawancara dengan Bapak RHM Rasyidi, selaku Ketua Komite di SMP Negeri 10 Palembang tanggal 13 Maret 2018 (Selasa, 10:15 WIB)

⁵³Hasil wawancara dengan bapak Tony Sidabutar, selaku Kepala Sekolah di SMP Negeri 10 Palembang tanggal 13 Maret 2018 (Selasa, 11:30 WIB)

d. Partisipasi Orang tua Murid

Sekolah bukanlah suatu lembaga yang terpisah dari masyarakat. Sekolah merupakan lembaga yang bekerja dalam konteks sosial. Sekolah mengambil siswanya dari masyarakat setempat, sehingga keberadaannya tergantung dari dukungan sosial dan finansial masyarakat. Oleh karena itu, hubungan sekolah dan masyarakat merupakan salah satu komponen penting dalam keseluruhan kerangka penyelenggaraan pendidikan. Adanya hubungan yang harmonis antara sekolah dan masyarakat yang diwadahi dalam organisasi Komite Sekolah, sudah barang tentu mampu mengoptimalkan peran serta orang tua dan masyarakat dalam memajukan program pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan ketua komite, ketua komite sekolah mengungkapkan :

*“Dengan adanya dukungan dari masyarakat setiap program dapat berjalan dengan baik. Selain itu, komite sekolah sebagai wadah dalam menyalurkan aspirasi masyarakat tentunya mampu mengoptimalkan peran serta orang tua dan masyarakat dalam meningkatkan proses pendidikan”*⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah, kepala sekolah mengungkapkan:

*“Dengan adanya hubungan yang harmonis antara sekolah dengan masyarakat ataupun orang tua murid dengan begitu masyarakat dapat ikut serta dalam membantu menyediakan fasilitas sekolah, memberikan bantuan tenaga, pemikiran ataupun saran yang diperlukan sekolah. Selain itu orang tua dapat memberikan informasi tentang potensi yang dimiliki anaknya. Hal ini dapat dapat mempermudah sekolah dalam meningkatkan proses pendidikan maupun proses belajar mengajar”*⁵⁵

⁵⁴Hasil Wawancara dengan Bapak RHM Rasyidi, selaku Ketua Komite di SMP Negeri 10 Palembang tanggal 13 Maret 2018 (Selasa, 10:15 WIB)

⁵⁵Hasil wawancara dengan bapak Tony Sidabutar, selaku Kepala Sekolah di SMP Negeri 10 Palembang tanggal 13 Maret 2018 (Selasa, 11:30 WIB)

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka peneliti mengemukakan, perlu adanya hubungan yang harmonis antara sekolah dengan masyarakat. Penulis menganalisis bahwa faktor pendukung dari implementasi komite sekolah ini juga dari hubungan sekolah dengan orang tua murid yang harmonis. Tanpa adanya dukungan dari masyarakat ataupun orang tua proses pendidikan tidak akan berjalan dengan baik.

Dari beberapa faktor pendukung yang teridentifikasi diatas maka antara sekolah, komite dan masyarakat berusaha seoptimal mungkin untuk mendukung dan melaksanakan program-program yang terkait di SMP Negeri 10 Palembang.

2. Faktor Penghambat

Selain faktor pendukung ada juga faktor penghambat implementasi komite sekolah yang berupa a) lemahnya sumberdaya organisasi b) kurangnya Penguatan kelembagaan komite sekolah, b) kurangnya kemampuan organisasional komite sekolah, dan c) lemahnya partisipasi murid.

Seperti yang dikemukakan ketua komite sekolah dalam hasil wawancara peneliti mengemukakan faktor penghambat dalam upaya komite sekolah dalam meningkatkan proses pendidikan yaitu:

“Yang menjadi faktor penghambat implementasi komite sekolah adalah kurangnya kepedulian orang tua murid terhadap sekolah, dukungan dari orang tua ini begitu diperlukan untuk menunjang berjalannya pelaksanaan program komite sekolah”⁵⁶

⁵⁶Hasil Wawancara dengan Bapak RHM Rasyidi, selaku Ketua Komite di SMP Negeri 10 Palembang tanggal 13 Maret 2018 (Selasa, 10:15 WIB)

Dari hasil wawancara di atas yang dilakukan peneliti maka peneliti dapat mengemukakan faktor penghambat implementasi komite sekolah. Faktor-faktor tersebut diantaranya yaitu kurangnya kepedulian orangtua murid, terbatasnya dana yang tersedia, kurangnya penguatan kelembagaan komite sekolah, dan kurangnya organisasional komite sekolah.

a. Lemahnya Sumber Daya Organisasi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan kepala sekolah, mengungkapkan:

*“Salah satu faktor yang menghambat upaya komite sekolah dalam meningkatkan proses pendidikan dikarenakan kurangnya waktu yang tersisihan untuk organisasi, masih ada beberapa pengurus komite sekolah yang disibukkan dengan pekerjaan masing-masing. Dan kadang-kadang sulit untuk meluangkan waktu untuk ikut berkontribusi dalam kegiatan komite”*⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan ketua komite sekolah mengungkapkan.

*“Masih sering dialami, gerakan program atau kegiatan sering terhambat karena keterbatasan sumber daya organisasi. Masih butuhnya waktu dan upaya agar komite sekolah menjadi organisasi yang profesional. Dalam hal ini tentunya menjadi kendala dalam meningkatkan proses pendidikan, karena adanya kendala waktu yang tidak bisa tercurahkan oleh anggota komite sekolah”*⁵⁸

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti tentang lemahnya sumber daya organisasi yaitu masih ada beberapa pengurus yang masih sulit untuk

⁵⁷Hasil wawancara dengan bapak Tony Sidabutar, selaku Kepala Sekolah di SMP Negeri 10 Palembang tanggal 13 Maret 2018 (Selasa, 11:30 WIB)

⁵⁸Hasil Wawancara dengan Bapak RHM Rasyidi, selaku Ketua Komite di SMP Negeri 10 Palembang tanggal 13 Maret 2018 (Selasa, 10:15 WIB)

meluangkan waktu karena kesibukannya diluar sebagai anggota komite sekolah. Hal ini tentunya dalam pelaksanaan program maupun kebijakan masih terhambat karena keterbatasan sumber daya.

b. Kurangnya Penguatan Kelembagaan Komite Sekolah

Salah satu faktor penghambat implementasi komite sekolah di sekolah dengan kurangnya penguatan kelembagaan komite di SMP Negeri 10 Palembang. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan ketua komite sekolah sebagai berikut:

*“Dalam penguatan kelembagaan komite sekolah diperlukan adanya rasa memiliki terhadap organisasi. Rasa memiliki ini menjadi salah satu kelemahan dari komite SMP Negeri 10 Palembang, karena kebanyakan pengurus tidak dapat bekerja secara maksimal, karena memiliki aktifitas pekerjaan yang kadang-kadang sulit untuk meluangkan waktu untuk ikut berkontribusi dalam kegiatan komite. Hal ini tentunya akan membuat melemahnya rasa memiliki terhadap organisasi akan menurun ”*⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan kepala sekolah mengungkapkan:

*“Meskipun perekrutan perwakilan belum maksimal, namun menurut saya kerjasama lembaga yang dijalankan oleh komite sekolah sudah berjalan dengan baik. Komite sekolah juga menjadi ujung tombak dari checks and balances terhadap proses pendidikan di sekolah. ”*⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti mengemukakan bahwa dalam implementasi komite sekolah diperlukannya rasa memiliki terhadap organisasi.

⁵⁹Hasil Wawancara dengan Bapak RHM Rasyidi, selaku Ketua Komite di SMP Negeri 10 Palembang tanggal 13 Maret 2018 (Selasa, 10:15 WIB)

⁶⁰Hasil wawancara dengan bapak Tony Sidabutar, selaku Kepala Sekolah di SMP Negeri 10 Palembang tanggal 13 Maret 2018 (Selasa, 11:30 WIB)

Sense of belonging (rasa memiliki) diperlu ditingkatkan karena dengan adanya sifat tersebut akan membuat komite sekolah lebih mudah dalam melaksanakan program atau kebijakan, selain itu komite sekolah harus memanfaatkan kemampuannya masing-masing agar program dapat dengan terlaksana dan tercapai sesuai yang diharapkan.

c. Kurangnya Kemampuan Organisasional Komite Sekolah

Kemampuan organisasional komite sekolah ini sangat dibutuhkan dalam melaksanakan program kerja komite. Dengan secara aktif anggota komite memanfaatkan kemampuannya masing-masing dalam melaksanakan program dengan begitu dapat dengan mudah mencapai tujuan yang diharapkan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan guru peneliti menemukan faktor penghambat yang ada dalam imlementasi Komite Sekolah. Berdasarkan hasil wawancara kepala sekolah, mengungkapkan:

“Agar organisasional komite sekolah dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan keahlian yang dimiliki oleh anggota komite sekolah, namun yang menjadi kendala dalam peningkatan proses pendiidikan yaitu masih ada sebagian pengurus tidak memiliki jenjang pendidikan yang tinggi, sehingga sulit untuk menyatukan pendapat atau aspirasi masing-masing”⁶¹

Menurut guru yang ada di SMP Negeri 10 Palembang, mengemukakan tentang faktor yang mempengaruhi implementasi komite sekolah.

⁶¹Hasil wawancara dengan bapak Tony Sidabutar, selaku Kepala Sekolah di SMP Negeri 10 Palembang tanggal 13 Maret 2018 (Selasa, 11:30 WIB)

“Dalam penguatan organisasional komite sekolah dibutuhkan kerjasama yang baik antar pengurus komite sekolah, akan tetapi masih ada beberapa anggota atau pengurus yang masih disibukkan dengan pekerjaan atau profesinya masing-masing”⁶²

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat mengemukakan, hambatan yang dihadapi dalam implementasi komite sekolah salah satunya yaitu kurangnya organisasional komite sekolah. Hal ini dapat dilihat dari beberapa anggota komite sekolah belum mampu memanfaatkan keahliannya dalam melaksanakan program yang ada di sekolah tersebut..

d. Lemahnya Partisipasi Orangtua Murid

Berdasarkan hasil wawancara yang dikukan peneliti dengan ketua komite sekolah yaitu:

“Program kerja komite sekolah tidak akan berjalan tanpa adanya peran serta orangtua murid, namun masyarakat atau orangtua murid belum terlalu peduli akan pendidikan”⁶³

Menurut guru yang ada di sekolah SMP Negeri 10 Palembang juga mengemukakan :

“Dalam implementasi Komite Sekolah dukungan dari orang tua murid sangatlah diperlukan, baik dukungan berupa pemikiran, tenaga maupun pendanaan agar program dapat terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan, akan tetapi dalam hal ini memiliki kendala dalam mengumpulkan orang tua murid. Masih banyak orang tua atau wali

⁶²Hasil Wawancara dengan Bapak Rusdamin, selaku guru di SMP Negeri 10 Palembang tanggal 12 Maret 2018 (Senin, 11.00 WIB)

⁶³Hasil Wawancara dengan Bapak RHM Rasyidi, selaku Ketua Komite di SMP Negeri 10 Palembang tanggal 13 Maret 2018 (Selasa, 10:15 WIB)

*murid yang tidak hadir ketika diadakannya sosialisasi untuk peningkatan pendidikan di sekolah.*⁶⁴

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti yang berkaitan dengan hubungan sekolah dengan masyarakat dengan wali murid memang sudah baik dan mendukung setiap kegiatan yang diadakan oleh pihak sekolah maupun pihak komite sekolah. Namun, yang menjadi kendalanya adalah sulitnya dalam mengumpulkan orang tua murid. Hal ini dikarenakan oleh kesibukkan masing-masing orang tua murid.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dapat mengemukakan bahwa kontribusi orang tua murid sangatlah dibutuhkan dalam implementasi Komite Sekolah di SMP Negeri 10 Palembang, akan tetapi masih sulit untuk mengumpulkan orang tua murid ketika sekolah dan pihak komite mengadakan sosialisasi. Dalam hal ini pihak sekolah tidak henti-hentinya untuk mengajak orangtua untuk ikut serta dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh pihak komite ataupun pihak sekolah.

Dengan demikian, beberapa faktor penghambat seperti faktor terbatasnya dana yang tersedia, kurangnya penguatan kelembagaan komite sekolah, kurangnya kemampuan organisasional komite sekolah dan hubungan sekolah yang kurang harmonis terhadap stakeholder terutama orang tua murid sangat mempengaruhi implementasi komite sekolah di SMP Negeri 10 Palembang.

⁶⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Rusdamin, selaku guru di SMP Negeri 10 Palembang tanggal 12 Maret 2018 (Senin, 11.00 WIB)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memperhatikan hasil analisis data yang terkumpul dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi tentang implementasi Komite Sekolah di SMP Negeri 10 Palembang dapat disimpulkan bahwa:

1. Komite sekolah yang ada di SMP Negeri 10 Palembang telah melaksanakan peran dan fungsinya dengan melakukan berbagai usaha untuk merealisasikannya meskipun dalam implementasi komite sekolah masih ada beberapa hal yang harus ditingkatkan. Hal yang dilakukan komite sekolah yaitu dengan memberikan pertimbangan, masukan dalam penyusunan RAPBS, program kerja, dan kebijakan sekolah. Membantu dalam pengadaan sarana dan prasarana sekolah untuk menunjang proses belajar mengajar. Memonitoring pelaksanaan program serta mengontrol kinerja guru dan hasil belajar peserta didik. Mendukung dan ikut mendanai kegiatan IMTAQ. Serta mengontrol program kegiatan di sekolah dan mengadakan kegiatan yang melibatkan orang tua murid, pihak sekolah dan masyarakat.
2. Dalam implementasi Komite Sekolah tentu saja komite sekolah mempunyai faktor pendukung dan kendala atau faktor penghambat. Faktor pendukung

tersebut yaitu penguatan lembaga komite sekolah, penguatan organisasional komite sekolah, menjalin kerjasama antara komite sekolah dan institusi lain, dan hubungan baik antara sekolah dengan wali murid. Dengan adanya keempat faktor pendukung tersebut dapat menunjang implementasi komite sekolah Komite Sekolah. Selain faktor pendukung terdapat pula faktor penghambat komite sekolah dalam meningkatkan proses pendidikan, faktor tersebut diantaranya lemahnya sumber daya organisasi, kurangnya penguatan kelembagaan komite sekolah, kurangnya kemampuan organisasional komite sekolah, dan lemahnya partisipasi murid.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis menyarankan saran yang bersifat konstruktif guna perbaikan dalam implementasi komite sekolah yang akan datang diantaranya:

1. Bagi Kepala sekolah, masyarakat sekolah dan Komite Sekolah dapat bekerja sama dengan baik untuk membuat rencana pengembangan sekolah dan penyusunan rencana anggaran sekolah secara partisipatif didorong berinovasi dan berimprovisasi agar menjadi kreatif dan berprakarsa. Dan menjadikan sekolah sebagai tempat perubahan.
2. Bagi orang tua atau masyarakat, agar lebih dapat memperhatikan adanya komite di sekolah dan agar dapat ikut bekerja sama dalam meningkatkan

proses pendidikan agar lebih baik. Selain itu ikut mendukung anak-anaknya dalam proses pendidikan yang sedang dijalani.

3. Bagi Peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya di sekolah SMP Negeri 10 Palembang dan dapat ditindak lanjuti dalam model penelitian yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi Hasan. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka
- Annur, Saiful. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Palembang: Grafika Telindo Press
- Arief, Armai. 2005. *Reformasi Pendidikan Islam* Jakarta:CRSD PRESS,
- Arikunto, Suharsimi dkk. 2007. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Departemen Pendidikan Nasional. 2004. *Acuan Operasional dan Indikator Kinerja Komite Sekolah*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan dan Menengah
- Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. 2006. *Pemberdayaan Komite Sekolah*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional
- Hasan, Alwi. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka
- Hasbullah. 2006. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidika*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Hasbullah. 2006. *Otonomi Pendidikan* .Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Ihsan, Fuat. 1997. *Dasar-Dasar Pendidikan*. Jakarta:Rineka Cipta
- Iis Dahlia. 2015. *Peran Komite Madrasah dalam Rencana Kerja Madrasah di Madrasah Ibtidaiyah Az-Zahir Palembang*. Palembang: Fakultas Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang
- Kompri. 2014. *Manajemen Sekolah: Teori dan Praktik*. Bandung: Alfabeta,
- Mulyasa. 2006. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Rosdakarya
- Oviyanti, Fitri. dkk. 2015. *Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran*. Palembang:Noer Fikri Offset

- Restu Handayani. 2011. *Peran Komite Madrasah dalam Pengembangan Madrasah di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Model Palembang*, Palembang: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan.
- Sagala, Saiful. 2009. *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*. Bandung: Alfabeta
- Saha Ghofur, Hanief. 2017. *Arsitektur Mutu Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Cahya Prima Sentosa
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung : Alfabeta
- Sulaiman. 2011. *Kinerja Komite Sekolah pada SDN 1 Kota Agung Kabupaten Lahat*. Palembang: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2005. Yogyakarta: Media Abadi
- Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Bandung: Fokus Media
- Wibowo. 2016. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Rajagrafindo Persada

DOKUMENTASI GAMBAR



(Gambar Program Komite Sekolah Semester Ganjil di SMP Negeri 10 Palembang)



(Gambar Rapat Komite Sekolah SMP Negeri 10 Palembang)



(Gambar Perolehan Piala dalam Lomba MTQ yang didanai oleh Komite Sekolah)



(Gambar Sosialisasi UNBK bersama Para Wali Murid SMP Negeri 10 Palembang)



(Gambar Tahfiz 1-2 Juz bersama Siswa SMP Negeri 10 Palembang)



(Gambar Komite bersama Wali Kota Palembang dalam Acara MTQ tingkat SMP)

TRANSKIP OBSERVASI

Tanggal : 6 Maret 2018

Tempat : SMP Negeri 10 Palembang

Observer :

NO	HAL YANG DIAMATI	HASIL PENGAMATAN
1.	Kondisi sarana dan prasarana sekolah	Dari hasil pengamatan peneliti tentang keadaan sarana dan prasarana yang ada di SMP Negeri 10 Palembang dalam menunjang proses belajar mengajar di sekolah sudah cukup memadai diantaranya sarana komputer yang dapat digunakan untuk proses belajar siswa. Sarana ini merupakan hasil dari kerjasama komite sekolah dan pihak sekolah.
2.	Program kerja komite sekolah	Dari hasil dalam proses observasi yang telah dilakukan selama 2 hari di SMP Negeri 10 Palembang sudah berjalan dengan baik, program kerja dibahas dalam forum rapat antara komite sekolah, orangtua murid, dan guru.

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Bapak RHM Rasyidi, SE

Jabatan : Ketua Komite Sekolah

Jenis Kelamin : Laki-laki

No.	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Wawancara
1.	Apakah komite sekolah memberikan masukan untuk penyusunan RAPBS dilihat dari komite sebagai badan pertimbangan?	Dalam penyusunan RAPBS ini perlu dikoordinasikan dengan beberapa pihak sehingga tidak terjadi kesalah pahaman, dalam hal ini komite sekolah juga ikut serta dalam penyusunan RAPBS. Keterlibatan komite sekolah dalam proses penyusunan RAPBS ini tidak lain sebagai perwakilan dari masyarakat. Dengan demikian orang tua murid jelas mengetahui pendanaan sekolah dan kebutuhan sekolah yang digunakan untuk proses pendidikan.
2.	Apakah komite sekolah memberikan masukan terhadap proses pengelolaan pendidikan di sekolah dan memerikan masukan terhadap pembelajaran kepada guru dilihat dari komite sebagai badan	Komite sekolah juga ikut serta memberikan masukan terhadap pembelajaran guru. Masukan dari komite sekolah tersebut disampaikan ketika diadakan forum rapat. Selain itu komite sekolah

	pertimbangan?	juga ikut serta dalam memonitoring pelaksanaan program dan ikut serta memfasilitasi sumber daya manusia (SDM).
3.	Menurut bapak apa saja yang sudah dilakukan komite sekolah dalam meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang keberhasilan proses pendidikan, dilihat dari komite sebagai badan pendukung?	Yang telah dilakukan oleh komite dalam menunjang keberhasilan proses pendidikan diantaranya yaitu dengan sumbang saran baik yang berwujud pemikiran, pembiayaan, sarana dan prasarana, maupun berupa tenaga.
4.	Bagaimana komite melaksanakan program kerja, mengawasi, dan mengevaluasi program kerja?	Terlebih dahulu dengan dimulai penyusunan program yang telah dibuat maka komite dapat melaksanakan program, selain itu komite juga harus bisa mencari cara atau strategi agar program tersebut terlaksana sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Setelah melaksanakan program kerja dan mengawasinya perlu diadakannya pengevaluasinya terhadap program kerja tersebut
5.	Menurut bapak sejauhmana komite sekolah mengontrol perencanaan pendidikan, hal ini dilihat dari komite sekolah sebagai badan	Komite harus mempunyai perencanaan program dalam setiap tahunnya, setidaknya penyusunan program/laporan kerja tersebut

	pengontrol?	dilakukan 2 kali dalam setahun. Perencanaan program tersebut dilakukan di awal dan akhir tahun ajar. Hal ini dilakukan agar dapat mengetahui sejauh mana program atau kegiatan sudah berjalan dan untuk mengetahui hambatan-hambatan apa yang dihadapi sekolah. Sebagai badan pengontrol komite sekolah bekerja sama dengan masyarakat atau orang tua siswa yang sifatnya tidak mengikat.
6.	Sejauh ini apa yang dilakukan komite sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dilihat dari komite sekolah sebagai mediator?	Ketua dan anggota komite sekolah berkomunikasi langsung dengan orang tua murid, wali siswa, ataupun masyarakat. Dengan cara komite sekolah mengundang orang tua murid agar dapat bermusyawarah berkenaan hambatan-hambatan dalam proses pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan.
7.	Dukungan apa yang diberikan oleh komite sekolah SMP Negeri 10 Palembang?	Komite sekolah sebagai lembaga perwakilan orangtua siswa ikut berperan dalam meningkatkan proses pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dukungan tenaga dan sarana dan

		prasarana. Dukungan tersebut diantaranya yaitu pada masalah pembiayaan, IMTAQ, dan sarana komputer
8.	Apakah komite sekolah memberikan pertimbangan tentang anggaran yang dapat dimanfaatkan sekolah?	Komite sekolah harus memberikan pertimbangan tentang anggaran yang dimanfaatkan oleh sekolah, selain komite sekolah badan perwakilan masyarakat, komite juga harus memberikan pertimbangan terhadap pendaan yang digunakan untuk kebutuhan sekolah.
9.	Sejauh ini apa yang telah dilakukan oleh komite sekolah dalam meningkatkan penyelenggaraan pendidikan?	Dengan membuat program kerja dan mengadakan sosialisasi dengan sekolah dan mengundang orang tua siswa. Program kerja tersebut merupakan penjabaran dari peran dan fungsi komite sekolah yaitu sebagai pemberi pertimbangan kepada pihak sekolah ,pendukung baik berupa tenaga, pikiran, maupun dana, pengontrol penggunaan dana BOS dan BPP, dan lain sebagainya dan sebagai mediator antara masyarakat dengan sekolah.
10.	Faktor apa saja yang mendukung implementasi komite sekolah?	Faktor yang mendukung adalah faktor internal dan eksternal. Faktor dari dalam yaitu kemampuan

		penguatan kelembagaan komite sekolah dan organisasional komite sekolah yang baik faktor eksternal yaitu hubungan komite sekolah yang harmonis terhadap orangtua siswa, serta komite sekolah menjalin kerja sama dengan institusi terkait dalam rangka terselenggaranya proses pendidikan yang berkualitas.
11.	Faktor apa saja yang menghambat proses implementasi komite sekolah?	Faktor orangtua yang menjadi salah satu kendala dalam upaya komite sekolah dalam meningkatkan proses pendidikan. Orang tua siswa belum terlalu peduli terhadap pendidikan anaknya, hal ini dapat dilihat dari diadakannya perkumpulan orangtua siswa. Selain itu keterbatasan dana menjadi faktor penghambat komite sekolah dalam meningkatkan proses pendidikan. Masih ada beberapa pengurus komite sekolah yang masih disibukkan dengan pekerjaan masing-masing dan sulit meluangkan waktu untuk ikut berkontribusi dalam kegiatan komite.
12.	Bagaimana cara pihak komite	Jika ada hambatan yang terjadi

	sekolah menyikapi hambatan yang dihadapi?	maka pihak komite sekolah mencari solusi dengan mengadakan rapat dengan pihak sekolah untuk menemukan jalan keluar agar dapat meningkatkan proses pendidikan..
--	---	--

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Rusdamin, S. Ag

Jabatan : Guru

Jenis Kelamin : Laki-laki

No.	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Wawancara
1.	Apakah komite sekolah memberikan masukan untuk penyusunan RAPBS dilihat dari komite sebagai badan pertimbangan?	Dalam penyusunan RAPBS komite sekolah ikut serta memberikan masukan, karena setiap awal tahun ajaran adanya program RAKS dan hal ini disampaikan kepada orang tua siswa melalui komite sekolah.
2.	Apakah komite sekolah memberikan masukan terhadap proses pengelolaan pendidikan di sekolah dan memberikan masukan terhadap pembelajaran kepada guru?	Komite sekolah ikut membantu pihak sekolah dalam pengelolaan pendidikan dan memberikan masukan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi proses pendidikan.

3.	Menurut bapak apa saja yang sudah dilakukan komite sekolah dalam meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang keberhasilan proses pendidikan?	Dalam hal peningkatan sarana dan prasarana komite sekolah melakukan kerjasama dengan intitusi lain dan melakukan pencarian dana untuk memenuhi sarana dan prasarana untuk menunjang keberhasilan proses pedidikan. Salah satu sumbangan dari komite sekolah berupa bantuan komputer.
4.	Menurut bapak apakah program komite sekolah sudah merujuk pada peningkatan proses pendidikan atau hanya sekedar pendukung saja?	Iya, menurut saya program kerja komite sekolah sudah merujuk pada peningkatan proses pendidikan.
5.	Apakah komite sekolah pernah memantau kondisi sarana yang di gunakan untuk proses pendidikan?	Komite sekolah memantau kondisi sarana yang digunakan untuk proses pendidikan setiap awal semester dan akhir semester. Selain itu, masalah sarana yang dibutuhkan oleh sekolah juga akan dapat dibahas dalm rapat komite.
6.	Menurut bapak sejauhmana komite sekolah mengontrol perencanaan pendidikan, hal ini dilihat dari komite sekolah sebagai badan pengontrol?	Dalam hal mengontrol perencanaan ketua komite sekolah yang mempunyai tanggung jawab lebih. Dan apabila rencana sudah disepakati maka selanjutnya dikoordinasikan dengan orangtua

		murid.
7.	Sejauh ini apa yang telah dilakukan oleh komite sekolah dalam meningkatkan proses pendidikan?	Upaya yang dilakukan komite sekolah dalam meningkatkan proses pendidikan adalah dengan menjalin kerja sama komite sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, dan memberikan dukungan berupa sarana.
8.	Faktor apa saja yang mendukung implementasi komite sekolah?	Yang menjadi faktor pendukung adalah pengurus komite sekolah banyak yang memiliki pendidikan tinggi, walaupun tidak seluruhnya. Dengan hal ini dapat dengan mudah diajak berpikir, dan dapat dengan mudah memecahkan masalah.
9.	Faktor apa saja yang menghambat implementasi komite sekolah?	Faktor yang menghambat implementasi komite sekolah yaitu kesibukan masing-masing anggota komite sekolah. Dan masih ada pengurus komite yang tidak menjalankan tugasnya sehingga menghambat jalannya program kerja komite sekolah dalam meningkatkan proses pendidikan.

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Tony Sidabutar, M. Pd

Jabatan : Kepala Sekolah

Jenis Kelamin : Laki-laki

No.	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Wawancara
1.	Apakah komite sekolah memberikan masukan terhadap proses pengelolaan pendidikan di sekolah dan memerikan masukan terhadap pembelajaran kepada guru?	Iya, komite sekolah memberikan masukan terhadap proses pengelolaan pendidikan dan masukan terhadap pembelajaran kepada guru melalui rapat baik yang diadakan oleh pihak sekolah maupun pihak komite sekolah.
2.	Menurut bapak sejauh mana komite sekolah memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan pendidikan? Dengan hal apa pemberian pertimbangan itu?	Komite sekolah memberikan pertimbangan dan rekomendasi dalam hal kebijakan program sekolah, RAPBS, kriteria kinerja sekolah, kriteria tenaga kependidikan, dan kriteria fasilitas pendidikan.
3.	Menurut bapak kendala apa yang menghambat implementasi komite sekolah?	Faktor yang menghambat yaitu masih sulit untuk mengumpulkan pengurus komite kerana masih ada beberapa pengurus yang disibukkan dengan profesinya masing-masing.

4.	Menurut bapak sejauhmana komite sekolah mengontrol perencanaan pendidikan, hal ini dilihat dari komite sekolah sebagai badan pengontrol?	Dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana program-program kerja sudah dilaksanakan oleh pihak sekolah, komite sekolah melakukan pengontrolan baik secara resmi maupun tidak resmi.
5.	Sejauh ini usaha apa yang dilakukan komite sekolah dalam pelaksanaan program dilihat dari komite sekolah sebagai mediator?	Komite sekolah disini sebagai jembatan antara orangtua murid dan sekolah, dalam hal ini meningkatkan proses pendidikan komite sekolah mengadakan sosialisasi pada semester ganjil, semester genap dan sosialisasi UNBK. Dengan mendatangkan orang tua murid dengan bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah.
6.	Dukungan apa yang diberikan oleh komite sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di SMP Negeri 10 Palembang?	Komite sekolah cukup memberikan dukungan untuk sekolah, dari dukungan berupa finansial, pemikiran ataupun tenaga. Dalam hal peningkatan proses pendidikan di SMP Negeri 10 Palembang komite sekolah memberikan sumbangan berupa komputer dan IMTAQ.
7.	Menurut bapak dalam melaksanakan kegiatan atau program komite	Iya benar, dalam melaksanakan program komite perlu adanya

	sekolah perlu adanya kerja sama dengan instansi lain?	kerja sama dengan masyarakat, baik perorangan, organisasi, dunia usaha maupun, dunia industri.
8.	Bagaimana peran serta masyarakat atau wali murid dalam implementasi komite sekolah di SMP Negeri 10 Palembang?	Orang tua murid atau masyarakat dapat ikut serta dalam memantau menyediakan fasilitas sekolah, memberikan bantuan berupa saran, tenaga, ataupun pemikiran yang diperlukan sekolah. Selain itu dengan adanya hubungan yang harmonis antara <i>stakeholder</i> dengan wali murid dapat mempermudah dalam meningkatkan proses pendidikan.
9.	Sejauh mana implementasi komite sekolah di SMP Negeri 10 Palembang?	Komite sekolah memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan pendidikan yaitu dengan ikut serta dalam memberikan masukan dalam penyusunan RAPBS, komite ikut serta mengontrol program-program kerja yang dilaksanakan oleh sekolah, dan terakhir dengan mengadakan sosialisasi yang diadakan pada semester ganjil dan semester genap.
10.	Bagaimana cara pihak sekolah dalam menyikapi hambatan yang dihadapi	Jika ada hambatan yang terjadi maka pihak sekolah bersama

	dalam implementasi komite sekolah?	dengan pihak komite sekolah mencari solusi dengan mengadakan rapat bersama untuk menemukan jalan keluar dan kembali memperbaiki semuanya.
--	------------------------------------	---

TRANSKIP DOKUMENTASI

Tanggal : 15 Maret 2018

Tempat : SMP Negeri 10 Palembang

No.	Hal yang di Dokumentasi	Hasil Dokumentasi
1.	Struktur komite sekolah	√
2.	Foto tentang kegiatan pelaksanaan program kerja komite sekolah	√